

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Bima

1. Keadaan Geografis

Kawasan Indonesia terkenal memiliki berbagai kekayaan alam yang berlimpah termasuk rempah-rempah serta berbagai kebudayaan dan suku yang beranekaragam. Dengan adanya berbagai keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ini menjadikan secara historis dan geografis Kota Bima yang merupakan pusat Kesultanan Bima dimasa lampau.

Dengan warisan kekayaan budaya yang dimiliki, Kota Bima dapat mengembangkan wisata budaya dengan kebudayaan Islam sebagai basisnya. Asi Mbojo (istana kesultanan), kuburan raja-raja dan para wali, permainan dan kesenian rakyat serta upacara keagamaan seperti perayaan maulud, U'a pua serta prosesi pelantikan raja dan lain-lain merupakan objek dan event yang sangat menarik. Sumber daya alam Kota Bima juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai Objek Daya Tarik Wisata karena letak Kota Bima berada di bibir Teluk yang sangat indah yang menawarkan berbagai atraksi wisata laut dan pantai seperti; berenang, berperahu, memancing, bersantai, melihat kehidupan masyarakat nelayan serta menikmati makanan khas desa tradisional nelayan. Kawasan pesisir dari Pantai Lawata sampai pintu gerbang Kota Bima bisa dikembangkan sebagai pusat perhotelan dan perdagangan souvenir.

Kota Bima yang awalnya merupakan kota administrasi Bima, terbentuk pada tanggal 10 April 2002 melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002. Terdapat berbagai pertimbangan yang mendasari pembentukan Kota Bima yang dimana merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Kota Bima. Pertimbangan-pertimbangan tersebut pada dasarnya terkait dengan pertimbangan politis dan juga pertimbangan pengembangan ekonomi dan pembangunan regional dalam rangka mendukung percepatan proses pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditinjau dari pertimbangan politis, terdapat dua opsi yang harus dipilih oleh Pemerintah Kota Administratif Bima sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada saat itu. Opsi yang pertama adalah Pemerintah Kota Administratif Bima harus menjadi kota yang otonom sedangkan opsi kedua adalah dihapuskannya status kota administratif jika Bima tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom.

Memilih opsi yang kedua berarti merupakan sejarah panjang tujuh belas tahun menuju pembentukan Kota Administratif Bima. Oleh karenanya, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bima harus mempersiapkan proses peningkatan statusnya menjadi daerah kota yang otonom, apalagi batas waktu proses peningkatan status ini pada saat itu hanya sampai bulan Mei 201.

Suatu penelitian awal dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2000 oleh Tim Teknis dari Pemerintah Kabupaten Bima, yang bertujuan untuk memberikan masukan ataupun berbagai informasi yang berkaitan dengan bidang-bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, pertahanan dan keamanan serta keadaan fisik di lapangan yang dapat digunakan sebagai bahan analisis dan penilaian terhadap kelayakan peningkatan status Pemerintahan Kota Administratif Bima menjadi Pemerintah Daerah Kota Bima.

Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.” Melalui serangkaian proses penilaian oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang antara lain melalui ekspos Pemerintah Kabupaten Bima di hadapan Tim Independen dari Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia dan menjelaskan bahwa kesepuluh rancangan Undang-undang tentang Pembentukan 22 Daerah Otonom, termasuk Kota Bima, yang disampaikan kepada Presiden pada tanggal 11 Maret 2002 telah mendapatkan persetujuan DPR RI dalam rapat paripurna ke-28 masa persidangan III Tahun Sidang 2001-2002.¹

¹<http://www.kemendagri.go.id.profil-daerah/kabupaten-nusa-tenggara-barat/kota-bima>. Diakses pada tanggal 20, maret 2018.

Kota Bima merupakan wilayah yang dikelilingi oleh laut sehingga disebut juga sebagai Kota tepian air dengan Kondisi Fisik Kota Bima berada di bagian timur Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi geografisnya terletak antara 118°41' – 118°48' Bujur Timur dan 8°30' – 8°20' Lintang Selatan. Sementara untuk luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 Km².

Wilayah Kota Bima sebagian besar tanahnya berada pada kemiringan 0–2% yaitu dengan kemiringan sebesar 18,33% dari luas wilayah, untuk kemiringan tanah antara 3–15% mempunyai luas 24,28% dari luas wilayah. Sedangkan lahan dengan kemiringan 16–40% seluas 23,76% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 33,63%. Berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kecamatan Rasanae Barat memiliki ketinggian 1-4 meter dpl, dimana wilayah tertinggi berada di Kelurahan Sarae dan terendah berada di Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung.

Rasanae Timur memiliki ketinggian 5-200 meter dpl, dimana wilayah tertinggi terdapat di Kelurahan Oi Fo'o dan Kelurahan Lelamese (170-200 meter dpl) dan terendah adalah Kelurahan Kumbe. Kecamatan Raba memiliki ketinggian wilayah 6-200 meter dpl, dengan wilayah tertinggi di Kelurahan Nitu dan terendah di Kelurahan Rite dan Penaraga (6 – 8 meter). Kecamatan Mpunda memiliki ketinggian 10 – 23 meter dpl, wilayah tertinggi terdapat di Kelurahan Sambinae dan Panggi dan terendah terdapat di Kelurahan Penatoi dan Kelurahan Lewirato. Kecamatan

Asakota, dengan ketinggian wilayah m,h 2-6 meter dpl, wilayah terendah sebagian besar Kelurahan Melayu.

Wilayah Kota Bima memiliki kedalaman efektif antara 30-60 cm, yakni sebesar 61,77 Ha, dengan sebaran terbesar di Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Raba. Sedangkan kedalaman efektif antara 0-30 cm seluas 4.227,16 Ha atau 19,46% merupakan daerah lembah dan pinggiran pantai yang tersebar di Kecamatan Asakota sebesar 1.262,23 Ha, Rasanae Barat 84,80 Ha, Mpunda 296,68 Ha, Kecamatan Raba dengan luas 1.772,45 Ha dan Kecamatan Rasanae Timur dengan luas 811,00 Ha. Kota Bima dilalui oleh 7 (tujuh) sungai, 3 (tiga) diantaranya merupakan sungai besar, yaitu: Sungai Padolo, Sungai Romo, Sungai Jatiwangi/Melayu. Hampir keseluruhan sungai yang ada mengalir di daerah irigasi dengan luas total 1.054 Ha.

Selanjutnya untuk wilayah administratif Kota Bima berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bima, yaitu : Sebelah Utara; Kecamatan Ambalawi, Sebelah Timur; Kecamatan Wawo, Sebelah Selatan; Kecamatan Palibelo, Sebelah Barat ; Teluk Bima

Kota Bima saat ini telah memiliki 5 kecamatan dan 38 kelurahan dengan luas wilayah 437.465 Ha dan jumlah penduduk 419.302 jiwa dengan kepadatan rata-rata 96 jiwa/Km². Jika dirincian dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1**Luas Wilayah Kota Bima Berdasarkan Kecamatan**

Kecamatan	Luas area (Km2)	Presentase (%)
Rasanae Barat	10.14	4.56%
Mpunda	15.28	6.88%
Rasanae Timur	64.07	28.83%
Raba	68.73	28.67%
Asakota	69.03	31.06%
	Jumlah =222.25 Km2	100,00 %

*Sumber: BPS Kota Bima. Kota Bima Dalam Angka 2017².

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kecamatan Asakota memiliki presentase terbesar dalam luas wilayah yaitu sebesar 31.06%, dan kecamatan Rasanae Timur memiliki presentase terbesar setelah Asakota dengan jumlah presentase 28.83%, dan presentase terbesar ketiga yaitu Raba 28.67%, Mpunda 6.88% dan yang paling kecil yaitu Mpunda sebesar 4.56%. Dan untuk presentase keseluruhanya 100% dengan jumlah luas wilayah 222.25 Km2.

² BPS Kota Bima. Kota Bima Dalam Angka 2017, Luas Wilayah Kecamatan di Kota Bima, "Area of District of BimaMunicipality".

2. Kependudukan (*Demografi*)

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Jika di rinciakan menurut umur dan jenis kelamin Penduduk Kota Bima dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Umur	L (N%)	P (N%)	Jumlah (N%)
0-14	15788 (21.41%)	15176 (28.61%)	30964 (19.27%)
15-24	17650 (23.94%)	17646 (33.27%)	35296 (21.97%)
25-34	13094 (17.76%)	13558 (25.56%)	26652 (16.59%)
35-39	21564 (29.25%)	33865 (63.86%)	55429 (34.51%)
60-69	3378 (4.58)	3823 (7.20%)	7201 (4.48%)
70-75+	2236 (3.03%)	2825 (5.32%)	5061 (3.15%)
Jumlah	73710	53028	160603

*Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kota Bima Dalam Angka 2017³

Sehingga dapat diketahui bersama, dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bima Menurut umur dan jenis kelamin sebanyak 160603 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 73710 jiwa, dan untuk penduduk perempuan sebanyak 53028 jiwa.

³BPS Kota Bima. Kota Bima Dalam Angka 2017, Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bima, *Human Development Index*.

3. Kehidupan Masyarakat

a. Kehidupan Politik

Masyarakat Kota Bima ialah tipe masyarakat yang memiliki keterarikan cukup besar dalam dunia politik. Hal ini dikarenakan peranan dari pemerintah Kota Bima yang terus berupaya dalam pengembangan budaya demokrasi dan pembagunan di tengah-tengah masyarakat Kota Bima.

Kegiatan kehidupan politik di Kota Bima memiliki cerita tersendiri, dan juga di pengaruhi berbagai unsur, misalnya kehidupan politik yang ada wilayah lain. Selan itu juga kegiatan politik yang ada di Kota Bima tidak dapat terlepas dari sistem kesultanan yang di anut oleh masyarakat Kota Bima. Begitupun dengan kegiatan politik yang sekarang pada awal terbentuknya dari sistem politik yang berupa penguasaan kerajaan dan kesultanan Bima (*Mbojo*).

Bima atau yang disebut juga dengan Dana Mbojo telah mengalami perjalanan panjang dan jauh mengakar ke dalam Sejarah. Menurut Legenda sebagaimana termaktub dalam Kitab BO (Naskah Kuno Kerajaan dan Kesultanan Bima), kedatangan salah seorang musafir dan bangsawan Jawa bergelar Sang Bima di Pulau Satonda merupakan cikal bakal keturunan Raja-Raja Bima dan menjadi permulaan masa pembabakan Zaman pra sejarah di tanah ini. Pada masa itu, wilayah Bima terbagi dalam kekuasaan pimpinan wilayah yang disebut Ncuhi.

Ada lima orang ncuhi yang tergabung dalam sebuah Federasi Ncuhi yaitu, Ncuhi Dara yang menguasai wilayah Bima bagian tengah atau di pusat Pemerintah. Ncuhi Parewa menguasai wilayah Bima bagian selatan, Ncuhi Padolo menguasai wilayah Bima bagian Barat, Ncuhi Banggapupa menguasai wilayah Bima bagian Timur, dan Ncuhi Dorowuni menguasai wilayah Utara. Federasi tersebut sepakat mengangkat Sang Bima sebagai pemimpin. Secara De Jure, Sang Bima menerima pengangkatan tersebut, tetapi secara de Facto ia menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Ncuhi Dara untuk memerintah atas namanya.

Pada perkembangan selanjutnya, putera Sang Bima yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala datang ke tanah Bima. Indra Zamrud lah yang menjadi Raja Bima pertama. Sejak saat itu Bima memasuki Zaman kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya menjadi sebuah kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam percaturan sejarah dan budaya Nusantara. Secara turun temurun memerintah sebanyak 16 orang raja hingga akhir abad 16.

Fajar islam bersinar terang di seluruh Persada Nusantara antara abad 16 hingga 17 Masehi. Pengaruhnya sangat luas hingga mencakar tanah Bima. Tanggal 5 Juli 1640 Masehi menjadi saksi dan tonggak sejarah peralihan sistem pemerintahan dari kerajaan kepada kesultanan. Ditandai dengan dinobatkannya Putera Mahkota La Ka'i yang bergelar Rumata Ma Bata Wadu menjadi Sultan Pertama dan

berganti nama menjadi Sultan Abdul Kahir (kuburannya di bukit Dana Taraha sekarang). Sejak saat itu Bima memasuki peradaban kesultanan dan memerintah pula 15 orang sultan secara turun menurun hingga tahun 1951.

Masa kesultanan berlangsung lebih dari tiga abad lamanya. Sebagaimana ombak dilautan, kadang pasang dan kadang pula surut. Masa-masa kesultanan mengalami pasang dan surut disebabkan pengaruh imperialisme dan kolonialisme yang ada di Bumi Nusantara. Pada tahun 1951 tepat setelah wafatnya sultan ke-14 yaitu sultan Muhammad Salahudin, Bima memasuki Zaman kemerdekaan dan status Kesultanan Bima pun berganti dengan pembentukan Daerah Swapraja dan swatantra yang selanjutnya berubah menjadi daerah Kabupaten.

Sudah 13 tahun ini Kota Bima dipimpin oleh seorang Wali kota dengan peradaban Budaya Dou Mbojo yang sudah mengakar sejak jaman kerajaan hingga sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat Kota Bima dalam kesehariannya. Baik sosial, Budaya dan Seni tradisional yang melekat pada kegiatan Upacara Adat, Prosesi Pernikahan, Khitanan dan lain-lain. Bahkan sezarah kesultanan telah menjadi Objek Wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara⁴.

⁴ Kota Bima. (2018, Februari 23). Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 11:43, Maret 20, 2018, dari <https://id.wikipedia.org/KotaBima>

Kehidupan politik di Kota Bima pun tidak terlepas dari gesekan-gesekan ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada), namun gesekan-gesekan yang terjadi tidak sampai pada ranah yang menimbulkan konflik besar, tetapi hanya ada pertikaian kecil antara simpatisan partai. Walaupun demikian Kota Bima merupakan salah satu wilayah yang cenderung panas dalam menyikapi berbagai kegiatan politik yang ada.

Pada Tahun 2016 lalu terjadi kasus pembakaran Kantor Bupati lama yang ada di Kota Bima, hal tersebut sekaligus di warnai dengan berbagai isu politik yang ada pada saat itu. Namun gesekan-gesekan yang ada ketika kasus itu terjadi tidak sampai mengara kepada konflik yang besar. Selanjutnya kehidupan politik di Kota Bima pada taun 2015 menjadi taun yang menentukan bagi daera di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi mengikuti pesta demokrasi yang disebut sebagai pilkada serentak. Dan Kota Bima sebagai salah satu daerah yang ikut dalam kontestan pilkada serentak tersebut.

Pilkada merupakan proses politik alam dalam dunia demokras menjadi oenting karena dalam konteks pilkada, para pemimpin daera mulai tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi ditentukan, masyarakat ikut serta terlibat secara langsung dalam memilih pemimpin daerahnya. Lewat pilkada pula lah masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam setiaip proses kehidupan politik yang berlangsung.

Dalam tataran teori sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih. Sehingga dalam kehidupan politik masyarakat Kota Bima tetap dilibatkan dalam proses politik tersebut. Hal ini yang menjadikan pelibatan masyarakat secara langsung akan memberikan legitimasi dan kepercayaan secara langsung oleh masyarakat kepada pemimpin yang terpilih pada setiap kegiatan politik yang ada di Kota Bima.

Pilkada di Kota Bima sangat menarik, hal tersebut bisa dilihat dari animo masyarakat dan antusias putra/putri terbaik daerah untuk ikut serta dalam kegiatan 5 tahunan tersebut. Pilkada Kota Bima harus menyuguhkan kompetisi yang sehat, jujur, *fair*, dan mendidik masyarakat secara politik dan dapat menjaga stabilitas daerah agar tidak terjadi pergolakan yang berujung pada konflik horizontal di kalangan masyarakat maupun antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

Kehidupan politik di Kota Bima yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu menjadikan kegiatan dan proses politik sebagai sebuah pesta demokrasi yang sangat menarik masyarakat, dan bahkan untuk saat ini Kota Bima sedang giat dalam mensosialisasikan mengenai tidak adanya politisasi *sara* dan politik uang, jual beli suara dan politik transaksional dalam proses pemilihan pemimpin daerah yang ada di wilayah Kota Bima.

b. Kehidupan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada wilayah tersebut pada taun tertentu. Jika kenaikan produksi barang dan jasa pada taun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan.

Untuk menghindari adanya pengaruh perubahan harga, maka pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan harga konstan. Dalam hal ini produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010⁵.

Keuangan dan Perekonomian Daerah Realisasi pendapatan dalam APBD Kota Bima dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 55,87% terutama yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah, diikuti dana perimbangan dan terakhir dari PAD. Mengikuti peningkatan pendapatan tersebut, anggaran belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 85,65% baik untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Belanja tidak langsung yang merupakan representasi dari kesejahteraan pegawai dan bantuan langsung kepada masyarakat (bantuan hibah dan bantuan sosial) mengalami peningkatan sebesar 100% sedangkan belanja langsung yang diperuntukkan belanja pembangunan mengalami peningkatan sebesar 73,3%. Realisasi APBD

⁵ BPS Kota Bima. Kota Bima Dalam Angka 2017

antara tahun 2007–2010 mengalami surplus, sedangkan pada tahun 2011 mengalami defisit sebesar Rp.1.896.523.415,00 yang diseimbangkan dengan anggaran yang bersumber dari SiLPA dalam penerimaan pembiayaan. Jika dilihat lebih rinci mengenai investasi sektor sanitasi dalam APBD Kota Bima untuk kurun waktu 5 tahun terakhir diketahui bahwa investasi belanja pembangunan pada sektor ini cukup fluktuatif dari tahun ke tahun baik jumlah maupun proporsinya terhadap total belanja APBD.

Komposisi penduduk Kota Bima berdasarkan mata pencaharian didominasi oleh petani, peternak dan jasa, pedagang dan juga pemerintahan yang besarnya masing-masing 45,84% dan 45,05%. Jenis pekerjaan yang digeluti penduduk Kota Bima antara lain: petani 15.337 orang, nelayan 425 orang, peternak 13.489 orang, penggalian 435 orang, industri kecil 1.952 orang, industri besar/sedang 76 orang, perdagangan 1.401 orang, ABRI 304 orang, guru 1.567 orang dan PNS berjumlah 2.443 orang⁶. Peluang tersebut didukung oleh ketersediaan sarana/prasarana yang cukup memadai seperti transportasi dan telekomunikasi, pasar dan pertokoan, maupun jasa perbankan. Di samping itu Pemerintah Kota Bima memberikan berbagai insentif bagi investor yang menanamkan modalnya berupa kemudahan perizinan dan penyediaan sarana pendukung.

⁶Kota Bima. [https://id.wikipedia.org/Kota Bima Wikipedia](https://id.wikipedia.org/Kota_Bima_Wikipedia), Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 10:43, 20, Maret 2018

Keuangan dan Perekonomian Daerah Realisasi pendapatan dalam APBD Kota Bima dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 55,87% terutama yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah, diikuti dana perimbangan dan terakhir dari PAD. Mengikuti peningkatan pendapatan tersebut, anggaran belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 85,65% baik untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Sehingga berdasarkan penjelasan dari Badan Pusat Statistik Kota Bima (BPS) pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bima setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik itu peningkatan yang berskala kecil maupun besar.

Berdasarkan potensi sumber daya yang ada, adapun mata pencaharian dari masyarakat Kota Bima sebagian besar berpeluang pada investasi yang cukup prospektif untuk dikembangkan di Kota Bima, antara lain di bidang: jasa, termasuk pengangkutan, kelistrikan dan telekomunikasi, perdagangan, agrobisnis/agroindustri, industri air minum kemasan, industri kecil dan kerajinan, pariwisata dan pendidikan. Sehingga dalam kehidupan ekonomi masyarakat Kota Bima sangat baik dan juga terdapat Sistem mata pencaharian yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bima mayoritas adalah bidang pertanian dan peternakan. Sistem mata pencaharian ini bersifat turun temurun, karena biasanya areal persawahan atau kebun serta ladang diwariskan pada generasi berikutnya.

c. Kehidupan Sosial dan Budaya

Suku asli masyarakat Kota Bima adalah suku Bima atau dikenal dalam bahasa lokal nya “Dou Mbojo”. Salah satu ke-unikan Kota Bima adalah sebagian dari masyarakat nya juga berasal dari berbagai suku dan etnik di indonesia seperti; Jawa, Sunda, Timor, Flores, Bugis, Bajo, Madura, Sasak (Lombok), Bali, Minang dan Batak sehingga memberi warna tersendiri di dalam keseharian mereka di Kota Bima (suku-suku ini selalu memeriahkan upacara dan pawai pada hari-hari besar di Kota Bima) dengan hidup berdampingan secara rukun dan damai serta suasana kondusif.

Orang Bima (Dou Mbojo) merupakan kelompok etnis yang menempati dataran tinggi, di bagian Timur Pulau Sumbawa. Secara historis, penduduk asli orang Bima adalah orang Donggo yang telah menghuni dana Mbojo (tanah Bima) sejak lama. Mereka sebagian besar menempati wilayah pegunungan. Orang Donggo mendiami sebagian besar wilayah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, yang dikenal dengan nama Dou Donggo Di, (orang Donggo Barat) dan sebagian lagi Dou Donggo Ele (orang Donggo Timur) mendiami Kecamatan Wawo Tengah (Wawo pegunungan) Kabupaten Bima seperti seperti Teta, Tarlawi, Kuta, Sambori dan Kalodu. Wilayah tempat tinggal dua kelompok ini dipisahkan oleh lautan, yaitu teluk Bima.

Orang Bima yang jumlahnya sekitar 774.930 jiwa adalah salah satu suku di Indonesia yang tersebar di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, selain suku Bima juga didiami oleh berbagai etnis. Seperti etnis Bugis, Makasar, Jawa, Sumatra, Madura, Arab, Cina sebagaimana juga tersebar hampir di seluruh pelosok tanah air Indonesia.

Keragaman etnis yang masuk di Bima juga menciptakan keragaman agama. Meskipun demikian agama Islam memiliki penganut yang dominan (97%) (BPS Kota Bima, 2009/2010). Mereka hidup dalam suasana yang damai dan harmonis serta berinteraksi satu sama lain dengan bahasa lokal, yaitu bahasa Bima (nggahi Mbojo). Kebudayaan sebagai sistem sosial budaya berarti sistem yang secara langsung bersifat adaptif terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian, kebudayaan dalam tulisan ini dipahami sebagai pola terpadu dari kepercayaan, pengetahuan, dan perilaku manusia yang tergantung pada kemampuannya untuk mempelajari dan mewariskan pengetahuan kepada generasi selanjutnya.

Suku Bima sebagai penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas di pulau Sumbawa bagian Timur tentu memiliki sistem sosial budaya sendiri meskipun itu adalah hasil akulturasi dengan kebudayaan lain. Kebudayaan suku Bima sebagaimana halnya kebudayaan suku lain di Indonesia memiliki sistem sosial budaya yang membangun

kepribadian masyarakatnya, sehingga menjadi ciri tersendiri sebagai wujud jati diri (identitas lokal) etnis Bima secara total dan utuh.

Dalam masyarakat Bima juga masih dijalankan sistem perjodohan sesama anggota keluarga atau masih terdapat hubungan keluarga, perjodohan ini biasanya mulai dilakukan pada saat anak-anak itu masih kecil, terutama pada saat pelaksanaan sunatan dan khitanan, dimana masing-masing orang tua melakukan *cepe kanefe* atau *cepe tembe* sebagai niat awal untuk menjodohkan anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang disunat tersebut dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, kultur masyarakat Kota Bima di daerah tertentu di Kota Bima pun masih sangat kental dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan adat istiadat yang ada di Kota Bima. Budaya yang ada juga tidak menutup diri dari budaya luar yang masuk dan datang ke Kota Bima selama budaya luar tersebut tidak merusak dan melanggar tradisi asli dan budaya lokal, maka masyarakat Kota Bima menerima dengan baik dan tangan terbuka terhadap setiap perkembangan kebudayaan dan perbedaan yang ada.

Sehingga hal ini jugalah yang menjadikan tumbuh serta terciptanya budaya toleransi di kalangan masyarakat Kota Bima dalam rangka mewujudkan pengembangan keidupan yang baik dalam Kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Bima, serta berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian Kota Bima.

d. Kehidupan Keagamaan

Secara historis Bima dulu merupakan salah satu pusat perkembangan Islam di Nusantara yang di tandai oleh tegak kokohnya sebuah kesultanan, yaitu kesultanan Bima. Islam tidak saja bersifat elitis, hanya terdapat pada peraturan-peraturan formal-normatif serta pada segelintir orang saja melainkan juga populis, menjadi urat nadi dan darah daging masyarakat, artinya juga telah menjadi kultur masyarakat Bima. Kondisi sistem religi masyarakat Bima sebelum agama Islam masuk adalah sistem kepercayaan yang bersifat animisme, yang oleh masyarakat Bima biasa di sebut dengan Parafu.

Parafu adalah suatu kepercayaan masyarakat terhadap roh-roh gaib, yang biasanya merupakan roh atau arwah para leluhur masyarakat Bima. Sistem nilai atau kepercayaan yang berkembang pada masa Parafu ini adalah bahwa tatanan kehidupan berupa rejeki, sakit, keselamatan, keberhasilan dan sebagainya dipengaruhi dan diatur oleh Parafu, dan Parafu sendiri oleh masyarakat Bima adalah juga merupakan tempat yang didiami oleh roh-roh atau arwah para leluhur.

Budaya rimpu (berjilbab dengan sarung, menutup seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki) telah menjadi warisan budaya yang amat berharga bagi orang Bima. Budaya rimpu merupakan perwujudan ajaran Islam tentang etika sosial dan hubungan manusia, khususnya dalam hal berbusana.

Rimpu adalah kreatifitas budaya orang Bima yang disemangati oleh nilai-nilai ajaran agama. Meskipun tidak menghilangkan substansi nilai budayanya, budaya rimpu sekarang menurut pengamatan penulis cenderung berkurang dan diganti dengan jilbab masa kini yang lebih praktis dengan membawa soji 'sesajen'.

Nilai-nilai Islam yang dijalankan pada masa Islam di Bima terbagi dalam tiga bentuk hubungan yaitu :

1. Hubungan Dengan Allah SWT Yang Maha Pencipta, yang dituangkan dalam bentuk kegiatan ibadah, yaitu sholat lima waktu, berdo`a, dzikir, bertafakur dan sebagainya.
2. Hubungan dengan sesama muslim dan sesama manusia, yang dituangkan dalam bentuk bertamu dan berbincang dengan tetangga, gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan pada saat kegiatan keagamaan seperti Idul Fitri Aruraja To`i, Idul Adha Aruraja Na`e, Isra` Mi`raz, Maulid Nabi dan sebagainya.
3. Hubungan dengan alam sekitar, dimana seluruh masyarakat menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di Bima sebagai rahmat dari Allah SWT, dengan memanfaatkannya sesuai kebutuhan dengan ketentuan tidak merusak dan memanfaatkannya secara berlebihan.

Selain menjalankan semua kegiatan ibadah menurut syariat Islam, oleh masyarakat Bima terdapat satu kebiasaan yang tetap dijaga sampai saat ini adalah menghormati hari Jum`at, dimana semua aktivitas ditinggalkan pada saat waktu Jum`at mulai masuk. Kemudian selanjutnya keagamaan masyarakat Kota Bima saat ini adalah mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yaitu sekitar 97,38% dan selebihnya memeluk agama Kristen Protestan 0,89%, Kristen Katolik 0,62% dan Hindu/Budhasekitar 1,11%.

Kota Bima merupakan daerah yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur dan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal, hampir semua masyarakat Kota Bima secara merata menjunjung tinggi nilai kebudayaan begitu juga dengan nilai-nilai keagamaan, tersebut. Salah satu spesifiknya terdapat di Kelurahan Penanae hal ini terlihat dari kearifan budaya lokal yang masih dijaga serta beberapa tradisi yang saat ini dimasukkan unsur agama, salah satunya agama Islam⁷. Dengan demikian kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibangun dengan baik oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat untuk terus menjaga kerukunan di Kota Bima.

⁷ Wawancara dengan Sudirman H. Makka, (Tokoh inspirator FKUB Kota Bima). Pada tanggal 04, April, 2018

Data kependudukan agama yang di anut oleh masyarakat di Kota Bima, dapat di lihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kota Bima⁸

Kecamatan	Budha(N%)	Hindu(N%)	Katolik(N%)	Protestan(N%)	Islam(N%)
Rasanae Barat	31 (88.57%)	41 (17.37%)	339 (49.56%)	649 (57.58%)	27683 (20.16%)
Mpunda	1 (2.85%)	31 (13.1%)	81 (11.84%)	121 (10.73%)	28698 (20.90%)
Rasanae Timur	0 (0%)	2 (0.84%)	0 (0%)	8 (0.70%)	16946 (12.34%)
Raba	0 (0%)	62 (26.27%)	126 (18.42%)	143 (12.68%)	35495 (25.85%)
Asakota	3 (8.57%)	100(42.37%)	138 (20.17)	206 (18.27%)	28462 (20.75)
Kota Bima	35	236	684	1127	137284

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Berdasarkan data di atas, dilihat secara komposisi maka penduduk Kota Bima mayoritas beragama muslim yaitu sebanyak 97,38 persen dengan jumlah 137284. Penganut Agama Prostestan tertinggi dengan jumlah 649, Katolik 339 , Hindu 41, Budha 31 Rasanae Barat, dan muslim tertinggi di Raba dengan jumlah 35495. Totalnya di Kota Bima terdapat 34 penganut Budha, 236 Hindu, 684 Katolik, 1127 Protestan, dan Islam dengan jumlah tertinggi yaitu 137284.

Tahun 2014 jumlah sarana tempat ibadah yang ada di Kota Bima tercatat 142 Masjid⁹. Dan rincian data tersebut dapat kita lihat pada tabel 4 berikut:

⁸ BPS Kota Bima. *Proyeksi Kota Bima Dalam Angka. (Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kota Bima)*. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Tabel 4**Jumlah Tempat Peribadatan di Kota Bima (bangunan)**

Kecamatan	Jumlah tempat peribadatan di Kota Bima (Bangunan)						
	Masjid N%	Musholla N%	Langgar N%	Gereja P N%	Gereja P N%	Pura N%	Vihara (N%)
Rasanae Barat	24 (16.90%)	32 (19.16%)	11 (18.96%)	2 (5,0%)	0 (0%)	1 (33.33%)	0 (0%)
Mpunda	31 (21.83%)	64 (38.32%)	6 (10.34%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Rasanae Timur	25 (17.60%)	16 (9.58%)	9 (15.51%)	0 (%)	0 (0%)	1 (33.33%)	0 (0%)
Raba	31 (21.83%)	37 (22.1%)	24 (41.37%)	1 (25%)	1 (1%)	0 (0%)	0 (0%)
Asakota	31 (21.83%)	18 (10.77%)	8 (13.79%)	1 (25%)	0 (0%)	1 (33.33%)	0 (0%)
Kota Bima	142	167	58	4	1	3	0

*Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Bima

Sehingga berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa penduduk Kota Bima yang muslim itu memiliki jumlah tempat peribadatan sebanyak 142 Masjid, 167 Musolla, 58 Langgar, dan bagi penganut Kristen Protestan terdapat 4 buah Gereja, dan 1 buah Gereja bagi penganut Kristen Katolik serta 3 buah Pura bagi penganut Hindu dan 0 Vihara budha.

e. Kehidupan Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia banyak ditentukan oleh pembangunan di bidang pendidikan. Pelaksanaan program pendidikan. Pelaksanaan

⁹BPS, Kota Bima Dalam Angka. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kota Bima,"Population by Religion and Region in Bima Municipality", Th. 2017

program pendidikan tersebut antara lain bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang potensial, selain itu diharapkan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada¹⁰.

Berbagai program dan kebijakan pembangunan dibidang pendidikan yang dilakukan langsung oleh pemerintah Kota Bima mulai dari penyediaan sarana/prasarana sampai dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik telah menjadi peningkatan pada berbagai aspek yang menjadi bagian dari bidang pendidikan. Selain peran pemerintah juga, peran pia swasta telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia pendidikan di daerah ini di berbagai jenjang pendidikan. Adanya program Bantuan Operasional Siswa (BOS) serta pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu telah banyak membantu penyelenggaraan dunia pendidikan di Kota Bima.

Melalui kehidupan pendidikan yang baik akan membantu terwujudnya pembangunan yang baik pula teradap suatu daerah, begitu pula halnya dengan kemajuan pada berbagai aspek kehidupan yang lain. Untuk mendorong dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tersebutlah, Kota Bima mengembangkan dunia pendidikan melauai sekolah dan salah satunya dapat kita liat dengan ketersediaanya sekolah/institusi yang menjadi

¹⁰ Nurul Zakiah, *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate Dalam Pengembangan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm. 43.

wadah dalam perkembangan dunia pendidikan, adapun pembagian penyebaran data sekolah yang ada di Kota Bima dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5

Jumlah Sekolah Negeri/ Swasta di Kota Bima

Kecamatan	Jumla Sekola Negeri/swasta								
	TK	SD	SMP	SMA/U	SMK	RA	MI	MTS	MA
Rasanae Barat	13 (19.40%)	16 (22.22%)	5 (20.83%)	4 (22.22%)	3 (27.27%)	6 (42.85%)	2 (25%)	3 (30%)	2 (33.33%)
Mpunda	12 (17.91%)	16 (22.22%)	3 (12.5%)	4 (22.22%)	3 (27.27%)	3 (21.42%)	3 (37.5%)	3 (30%)	2 (33.33%)
Rasanae Timur	10 (14.92%)	15 (20.83%)	5 (20.83%)	2 (11.11%)	0 (0%)	1 (7.14%)	1 (12.5%)	1 (10%)	0 (0%)
Raba	18 (26.86%)	19 (26.38%)	6 (25%)	6 (33.33%)	2 (18.8%)	1 (7.14%)	2 (25%)	2 (20%)	1 (16.6%)
Asakota	14 (20.89%)	6 (8.33%)	5 (20.83%)	2 (11.11%)	3 (27.27%)	3 (21.42%)	0 (0%)	1 (10%)	1 (16.6%)
Kota Bima	67	72	24	18	11	14	8	10	6

*Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Bima

Seperti yang telah disebutkan data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan dunia pendidikan di Kota Bima sangat memadai dengan adanya sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Dengan demikian sampai dengan tahun 2015 jumlah sarana pendidikan di mulai dari TK, SD, SMP, SMU, SMK, RA, MI, MTS, MA, Negeri/ swasta, sebanyak 67 TK, 72 SD, 24 SMP, 18 SMA/SMU, 11 SMK, 14 RA, 8 MI, 10 MTS, 6 MA yang ada di Kota Bima.

Selain itu juga tersedia sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, yaitu; Sekolah Tinggi Muammadiyah Bima (STAIM), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STI), STIE, STT, STIT, STKIP, STISIP, STAIS, STIKES, AKPER, Dan Politeknik Kesehatan Mandiri dengan berbagai disiplin ilmu atau fakultas yang tersedia untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data di atas Kota Bima turut serta memperhatikan dunia pendidikan yang ikut turut serta mewujudkan pembangunan daerah dan nasional secara bersama-sama melalui tersedianya ruang pendidikan yang cukup memadai dengan kehadiran sekolah-sekolah tersebut yang tersebar dan di bangun diberbagai lokasi di Kota Bima.

B. Gambaran Umum FKUB Kota Bima

1. Profil FKUB Kota Bima

Dalam pasal 1 butir 6 PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 menjelaskan bahwa forum kerukunan umat beragama (FKUB) merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, sehingga FKUB terdiri dari FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/Kota. Adapun FKUB Kota Bima ialah merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Kota Bima guna menciptakan kebersamaan dan menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bima¹¹.

FKUB Kota Bima telah terbentuk secara resmi sejak di terbitkannya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Proses pemilihan Ketua/ Pimpinan dari FKUB Kota Bima dilakukan secara musyawarah mufakat dan kandidat calon pada awalnya di prakarsai langsung oleh Kesabangpol Kota Bima, pada walnya terbentuk secara resminya FKUB Kota Bima yaitu pada bulan Juli, dan pada bulan

¹¹SK Walikota Bima, Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana , Dewan Penasihat Dan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima Tahun 2013, (Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 186 Tahun 2013). hal. 1-3

september sudah mulai membentuk pengurus tepatnya pada tanggal 12 september 2006. Dengan konsep satu orang satu suara, wan man one poeple, sehingga dari proses itulah muncul dua kandidat untuk dipilih yang akan menadi pemimpin/ ketua dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima.

Calon yang pertama adalah H. Eka Iskandar S.Ag., M.Si, sedangkan yang kedua adalah H. Ajrun sulaiman yang mewakili kalangan tua dan beliau merupakan sangat senior dan tokoh di Bima saat itu dan sampai sekarang masih hidup dan alhamdulillah pada saat pemilihan itu hanya beda satu suara dengan Ketua FKUB saat ini yaitu H. Eka Iskandar S. Ag., M.S.i . adapun suara totalnya adalah 105 suara dibagi 2 Ketua FKUB mendapat 53 suara dan calon yang kedua mendapatkan dapat 52 suara, dengan selisish hanya 1 suara¹².

Tujuan dari terbentuknya FKUB Kota Bima ialah untuk mengoptimalkan kerja pemerintah, dalam langkah pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadinya konflik baik di intern umat beragama ataupun antar umat beragama, selain itu juga jika sampai terjadinya konflik maka melalui FKUB konflik tersebut dapat terselsaikan dengan baik, dan melalui FKUB juga dapat mencipakan serta menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin dan terbingkai dengan baik.Sejak berdiri pada tahun 2006 hingga tahun 2018

¹² Wawancara dengan H.Eka Iskandar, S.Ag, M.Si., (Ketua FKUB Kota Bima). Pada tanggal 28, Maret 2018

FKUB Kota Bima memiliki sejumlah kegiatan dalam mengoptimalisasikan perannya untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Bima.

2. Keanggotaan FKUB Kota Bima

Berdasarkan pada isi dari PBM bab 3 pasal 10, yang menyatakan bahwa keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat; jumlah anggota dari FKUB Provinsi balik banyak 21 orang dan kemudian jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang; komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1(satu) orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹³

Pada pasal selanjutnya yaitu pada pasal 11 dijelaskan juga mengenai tentang dewan penasehat FKUB yang bertujuan untuk memperdayakan FKUB baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdiri dari: ketua yaitu wakil Bupati/Walikota, Wakil ketua yaitu kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sekretaris yaitu kepala badan kesatuan bangsa

¹³ Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Meneteri Dalam Negeri No.9 Dan No.8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah., Hal.7

dan politik Kabupaten/Kota (Kesbangpol), dan juga anggota lain yaitu dari pimpinan instansi terkait.¹⁴

Keanggotaan FKUB Kota Bima pada tahun 2018 ini, berjumlah 21 orang dengan perincian yaitu 4 orang merupakan dewan penasihat FKUB serta 17 orang merupakan pengurus FKUB, yang terdiri atas; golongan Islam sebanyak 14 orang yang di dalamnya terdapat Muhammadiyah 1 orang dan NU 1 orang, serta tidak ada salafiyah dan juga selebihnya adalah keterwakilan tokoh pemuda kristen katolik, dan juga tokoh perempuan dari Asyiah Kota Bima. Selanjutnya golongan Protestan sebanyak 1 orang, golongan Katolik 1 orang, golongan Hindu 1 orang, golongan Budha dan Ko Hu Cu tidak ada.

Selanjutnya untuk latar belakang dari ketua FKUB Kota Bima, H. Eka Iskandar M.Si dari segi pendidikan, SD dan MTS di Kota Bima kemudian melanjutkan studi di MAN Kota Jember, juga melanjutkan studi S1 Syariah di IAIN Surabaya, dan kemudian melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Aktif dalam organisasi muhammadiyah Dan pertama kali menjabat menjadi Ketua FKUB Kota Bima pada Tahun 2006 dengan melalui voting suara dalam musyawarah pemilihan ketua FKUB Kota Bima, dan pada akhirnya terpilih sebagai ketua dengan memperoleh jumlah voting suara selisih 1 angka dengan calon lain yang diusulkan.

¹⁴Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.9 Dan No.8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah, hal. 8

Untuk susunan perincian lebih detail mengenai nama-nama dari dewan penasihat dan pengurus FKUB Kota Bima dapat dilihat pada lampiran SK Walikota No.186/II/2013 tentang forum kerukunan umat beragama Kota Bima¹⁵. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 10 dari Peraturan Bersama Menteri pada intinya terdiri dari tokoh agama. Lebih lanjut juga di jelaskan bahwa keanggotaan tingkat provinsi terdiri dari pemuka-pemuka agama setempat sebanyak 21 orang. Adapun untuk komposisinya, berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama yang ada di wilayah setempat dengan keterwakilan 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Provinsi. Sedangkan keanggotaan yang ada pada tingkat kabupaten/kota terdiri dari 17 pemuka agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di kabupaten¹⁶.

Tentunya untuk formasi awal yang dengan ini mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut komposisi FKUB, disuruh kerja oleh Kesbangpol didalam kepengurusan anggotanya harus adanya keterwakilan masing-masing agama dalam menjalankan tugas dan peranananya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Bima¹⁷.

¹⁵SK Walikota Bima, Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana , Dewan Penasihat Dan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima Tahun 2013. (Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 186 Tahun 2013). hal.4

¹⁶ Nawari ismail, *Menakar Peran Lembaga Pengembangan Kerukunan Umat Beragama*. (Yogyakarta:Samudra biru. 2017), hlm.18

¹⁷ Wawancara dengan H.Eka Iskandar, S.Ag, M.Si., (Ketua FKUB Kota Bima). Pada tanggal 28, Maret 2018

3. Perkembangan FKUB Kota Bima

FKUB Kota Bima sebagai forum yang bertugas dalam mengembangkan kerukunan umat beragama di Kota Bima, sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2006 hingga saat ini terus mengalami perkembangan, baik dalam forumnya serta juga dalam peningkatan peranannya untuk menjaga kerukunan umat beragama di kota ini.

Dalam susunan kepengurusan dari FKUB Kota Bima, tidak mengalami banyak perubahan dari kepengurusan sejak terbentuknya hingga saat ini, salah satunya sejak awal dibentuk pada tahun 2006 hingga kini ketua dari FKUB Kota Bima masih dijabat oleh H. Eka Iskandar, S.Ag., M.Si, tetapi dalam menjalankan tugas pokoknya FKUB terlihat lebih baik dari sejak awal terbentuk.

Perkembangan FKUB dapat kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang dari awal terbentuknya kurang lebih selama tiga tahun hanya aktif dengan kegiatan sosialisasi mengenai FKUB Kota Bima dan PBM No.9 dan No.8, kini kegiatan-kegiatan tersebut terus berkembang dengan baik dengan jenis kegiatan yang bersifat dialog-dialog antar tokoh agama dan masyarakat, dan dalam kegiatannya juga turut serta melibatkan pemuda dalam setiap kesempatan dilalog yang di selenggarakan oleh FKUB¹⁸.

¹⁸ Wawancara dengan H.Eka Iskandar, S.Ag, M.Si., (Ketua FKUB Kota Bima), Pada tanggal 28, Maret 2018

Salah satu contohnya, sejak tahun 2016/2017 kemaren menggelar sebuah kegiatan baru yang menjadikan ruang untuk berdiskusi mengenai hal pengembangan kerukunan antar umat beragama di Kota Bima, kegiatan ini sekaligus menjadi unggulan dari program kerja FKUB Kota Bima, yaitu Coffe Morning dan Forum Group Discoussin (FGD), dengan menghadirkan berbagai tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, tokoh pemuda, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan FKUB seperti Ormas Islam dan juga tokoh-tokoh inisiasi dan inspirator dalam FKUB yang tidak pernah digelar ditahun-tahun sebelumnya yang hanya terfokus pada kegaitan sosialisasi¹⁹

Kegitan sosialisasi yang manjadi jembatan awal bagi FKUB Kota Bima dalam melebarkan sayap pada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan peranannya, yang di laksanakan oleh FKUB hingga pada saat kepengurusan sekarang. Pada awal terbentuknya perkembangan FKUB dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan pada komposisi umat beragama yaitu terdiri atas muslim, katolik, Hindu dharma, Protestan. Oleh Karena mayoritas agama di kota bima itu muslim, maka kalau di presentasikan umat islam iu 98, dan yang sisanya 2,2% itu non muslim yang tersebar pada agama Kristen katolik, Protestan sedangkan untuk Budha dan Ko Hong Cu tidak ada agamanya di Bima tapi orangnya

¹⁹ Wawancara dengan H.Eka Iskandar, S.Ag, M.Si., (Ketua FKUB Kota Bima), Pada tanggal 28, Maret 2018

ada, dan mereka lebih menisbatkan dirinya kepada Katolik atau Protestan dan jarang masuk Hindu.

Dari uraian perkembangan sejak awal terbentuknya FKUB Kota Bima dapat dilihat bahwa FKUB Kota Bima terus mengalami perkembangan yang cukup baik hingga saat ini, dengan kegiatan-kegiatan yang pada 3 tahun awal kepengurusan fokus pada sosialisasi dan tidak ada kegiatan sama sekali mengenai peningkatan peranan dari FKUB Kota Bima dalam pengembangan kerukunan antar umat beragama. Namun semenjak awal terbentuknya FKUB Kota Bima telah mengupayakan kegiatan-kegiatan dengan maksimal sebagai salah satu bentuk upaya dalam mewujudkannya kerukunan antara umat antar beragama di Kota Bima. Sekali lagi berdirinya FKUB dalam perkembangannya tidak lupa dari lahirnya Peraturan Bersma oleh Menteri Agama dan Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Gubernur NTB No. 25 Tahun 2008 semakin memperkuat jaringan FKUB.

Sebenarnya peraturan gubernur juga tidak jauh berbeda dengan PBM, yang lebih mengukuhkan keberadaan FKUB²⁰. Melalui Pergub itu lebih menitikberatkan pada hubungan antar umat beragama. Dengan mewujudkan kehidupan agama yang harmonis, toleransi yang baik. Serta perkembangan komposisi pertama dari awal sampai sekarang tetap sama dan tidak ada yang dirubah dalam komposisi agama yang ada di Kota Bima, kecuali

²⁰ *Ibid*, Pada tanggal 28, Maret 2018

mereka meninggal. Ketika mereka pun meninggal pun FKUB akan melakukan PAW (Perjanjian antar waktu).

FKUB Kota Bima sejak awal inga saat ini terus mengalami perkembangan yang cukup baik, kemudian pada tahun 2009 mulai di undang pada tingkat Provinsi untuk Sosialisasi, Raker, Rakerda, dan sebagainya. Dan juga studi banding yang membuat kita mengadopsi program kerja yang ada pada setiap kabupaten/kota. FKUB Kota Bima terus berupaya untuk mengembangkan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mengoptialkan peranannya dengan baik. Kegiatan yang pada awalnya anya banyak membaas mengenai sosialisasi, namun saat ini kegiatan FKUB tela berkembang denga melairkan berbagai kegiatan yang edukatif dan bersifat persuasif dan juga ikut serta melibatkan pemuda-pemudi serta toko perempuan yang ada di Kota Bima²¹. FKUB Kota Bima dalam perkembanganya ingga saat ini melairkan kegiatan edukatif, sala satu contohnya melalui kegitan rutin yang setiap bulanya dilaksanakan ole FKUB disebut dengan Cofee Morning.

²¹Wawancara dengan H.Eka Iskandar, M.Si., (Ketua FKUB Kota Bima), Pada tanggal 04, April 2018

C. Peranan Ideal FKUB Berdasarkan PBM No. 9 Dan No.8 Tahun 2006

Peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan oleh aktor yang didasarkan atas nilai yang diberikan masyarakat. Nilai itu dapat berupa pemahaman agama, tradisi, dan regulasi yang dikeluarkan negara.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima dalam perannya haruslah selalu mengacu pada PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 pada pasal 8, dan 9 yang mengatur tentang tugas dari FKUB di tingkat kabupaten/kota, sehingga apabila FKUB dalam hal ini FKUB Kota Bima mampu melaksanakan tugas tersebut, maka pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan yang di harapkan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

Adapun isi dari pasal 8 dan 9 PBM No.9 dan No.8 tahun 2006, sebagai berikut:

Pasal 8:²²

1. FKUB di bentuk di provinsi dan kabupaten/kota
2. Pembentukan FKUB sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah daerah

²² Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Meneteri Dalam Negeri No.9 Dan No.8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah., Hal.7

3. FKUB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9:²³

FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan peerdayaan masyarakat; dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Secara lebih terinci FKUB memiliki peran sebagai berikut:

1. Menjadi jembatan penghubung di internal umat masing-masing agama harus dapat menularkan kerukunan di internal umat

²³ Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Meneteri Dalam Negeri No.9 Dan No.8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah., Hal.7

2. Sebagai wahana komunikasi dan interaksi umat beragama dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati
3. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik
4. Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan
5. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama
6. Membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan
7. Bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif, dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di daerah²⁴

Berdasarkan pasal 8 dan 9 dari PBM No.9 dan No.8 tahun 2006, maka peranan ideal dari FKUB Kota Bima dapat dirumuskan sebagai tugas pokok dari FKUB Kota Bima yang tertulis di surat keputusan walikota (SK Walikota), dan tugas pokok tersebut terbagi atas dua yaitu tugas pokok dari dewan penasihat FKUB dan pengurus harian FKUB Kota Bima, sebagai berikut:

Tugas Pokok Dewan Penasihat FKUB Kota Bima:

²⁴ Nawari ismail, *Menakar Peran Lembaga Pengembangan Kerukunan Umat Beragama* (Yogyakarta:Samudra biru. 2017), hlm. 11-12.

- a. Membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan
- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Tugas Pokok Pengurus Harian FKUB Kota Bima:²⁵

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Bima
- d. Melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bima.

Dengan hal itu Peran Ideal FKUB adalah jelas sebagaimana yang diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tugas yang diemban FKUB meliputi: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala pemerintahan,

²⁵ SK Walikota Bima, Tentang *Pembentukan Panitia Pelaksana , Dewan Penasihat Dan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima Tahun 2013*, (Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 186 Tahun 2013), hal.2-3

melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan juga memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat bagi FKUB tingkat kota/kabupaten.

D. Kegiatan dari FKUB Kota Bima

1. Pengendalian Konflik dan Pemeliharaan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Bima

a. Pendekatan Persuasif

Kota Bima sebagai salah satu Kota di Indonesia, yang merupakan salah satu wilayah yang berada di segitiga emas yakni di tengah-tengah wilayah yang pernah terjadi kasus konflik antar umat beragama yaitu Solo, Poso, dan Papua. Untuk contoh kasusnya adalah konflik yang terjadi di Poso dan juga pembakaran rumah ibadah di Tolikara, Papua. Namun hal ini tidak lantas menjadikan kehidupan masyarakat Kota Bima tidak bisa hidup berdampingan satu sama lain dan juga ikut serta menjadi wilayah yang rawan konflik dan Masyarakat Kota Bima sejauh ini dapat hidup rukun dan bertoleransi antar umat beragama.

Dengan adanya konflik yang terjadi di beberapa wilayah tidak serta merta menjadikan Kota Bima diam saja, namun sebaliknya untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Bima, FKUB Kota Bima sebagai wadah masyarakat dalam menciptakan dan membangun kerukunan umat beragama di Kota Bima melakukan

berbagai kegiatan dan langkah dalam proses untuk pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan umat antar beragama.

Dalam upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Bima FKUB melakukan berbagai kegiatan yang edukatif melalui pendekatan persuasif yang dilakukan langsung oleh FKUB Kota Bima sebagai bentuk aktual dalam mewujudkan keidupan antar umat beragama yang rukun dan toleransi.

Melalui pendekatan persuasif FKUB Kota Bima cukup efektif dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya konflik di Kota Bima. Gaya manajemen konflik yang baik melalui pendekatan persuasif ini memberikan dampak yang positif terhadap kerukunan antar umat beragama di Kota Bima. Pendekatan persuasif tersebut dilakukan kepada masing-masing pimpinan agama yang ada di Kota Bima yaitu dengan di ajak diskusi dan di ikuetsertakan dalam komposisi kepengurusan FKUB Kota Bima²⁶

Untuk itu pendekatan persuasif menjadi salah satu langkah efektif dalam upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Bima. Melalui pendekatan tersebut FKUB Kota Bima dapat menempatkan bawa tidak adanya keberpihakan terhadap kaum mayoritas ataupun minoritas dalam

²⁶Wawancara dengan H.Eka Iskandar, S.Ag, M.Si., (Ketua FKUB Kota Bima), Pada tanggal 28, Maret 2018

menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga menumbuhkan kepercayaan antar satu sama yang lainya dengan tidak menematkan kepentingan pribadi atas kepentingan orang lain. Dengan mengundang seluruh tokoh lintas agama hadir dalam acara Cofee Morning, dan juga melalui pendekatan persuasif itulah FKUB Kota Bima dapat mengaselerasikan eksistensinya.

b. Kerja Lintas Sektoral

Berdasarkan informasi yang di peroleh bawa pada tingkat provinsi, dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang rukun, ksuususnya lagi pada hubungan antar umat beragama. Dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya saat ini sedang berupaya mengendalikan keadaan di Bima Bersama dengan Pemerintah Pusat, Terutama Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Hal ini terkait dengan mengantisipasi gerakan santoso yang sudah terjepit di Poso dan dikawatirkan akan pindah ke Bima, oleh sebab itu jika gerakan santosos berhasil masuk ke bima maka akan di khawatirkan akan mengganggu kerukunan internal maupun eksternal umat beragama²⁷.

Berdasarkan informasi yang di peroleh tersebut FKUB Kota Bima dalam upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antara umat beragama di Kota Bima melalukan pendekatan persuasif yang menfokuskan kepada para piak keluarag teroris. Melalui pendekatan

²⁷Nawari ismail, *Menakar Peran Lembaga Pengembangan Kerukunan Umat Beragama* (Yogyakarta:Samudra biru. 2017), hlm. 103.

persuasif yang suda di jelaskan sebelumnya inilah FKUB dapat mengembangkan peranannya dalam upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar mat beragama di butuhkan sebuah tim yang kuat, dan salah satu langkah yang di ambil ole FKUB adalah dengan melakukan kerja linas sektoral sebagai bentuk sinergi dan kelanjutan dari pendekatan persuasif.

Seingga melalui kerja lintas sektoral FKUB Kota Bima dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lancar yaitu, salah satunya adala dengan melakukan deteksi dini adanya kemungkinan konflik yang terjadi. Jika di temukan beberapa geala yang menunjukan adanya konflik maka dengan cepat FKUB melaksanakan kerja lintas sektoral tersebut. Dengan adanya informasi yang di perole terlebih dulu oleh Kesbangpol, dan embrio-embrio lahirnya konflik lebih awal diketahui dengan cepat ole Kesbangpol yang menjadi induk dari FKUB Kota Bima sekaligus merupakan sumber informasi yang akurat bagi FKUB dalam mengambil tindakan. Salasatu conto kasusnya adalah, Misalnya di titik A ada seseorang pendeta yang mendirikan gereja, maka Kesbangpol sudah mendeteksi dan sudah mengetahui sebenarnya apa yang sedang terjadi²⁸.

Untuk itu FKUB melaksanakan kerja lintas sektoral dengan memfasilitasi dan mengundang semua elemen dari TNI Dan POLRI Kesra, Kemenag, Tokoh Lintas Agama, Tokoh Intern Umat Islam Dari

²⁸Wawancara dengan H.Eka Iskandar M.Si., (Ketua FKUB Kota Bima). Pada tanggal 28, Maret 2018

Masing-Masing Ormas, untuk mengadakan pertemuan dan membicarakan hal yang sedang terjadi dan sekaligus mencari solusi. Dengan mengundang semua pihak dan elemen tersebut menandakan bahwa tidak ada yang ditutup-tupi karena FKUB bicara secara terbuka melalui pertemuan yang diagendakan tersebut, sehingga pada akhirnya itu di desain dan masuk dalam program kerja FKUB.

Sehingga dalam menjalankan tugasnya FKUB tidak jalan sendiri, sebab kalau sudah mengenai rawan konflik di Kota Bima maka hal yang dilakukan oleh FKUB adalah bima meminta bantuan intelejen, TNI dan POLRI serta teman-teman yang berseragam lain. Yang dimana kehadiran mereka turut serta mempermudah FKUB dalam menjalankan upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di Kota Bima. Pihak-pihak yang terkait dalam kerja lintas sektoral adalah pihak dari Mabes POLRI, BAIS, dan BIN mereka merupakan partner utama dalam rangka pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama. Melalui deteksi dini oleh Kesbangpol dan FKUB merayap untuk upaya bagaimana agar tidak terjadinya konflik²⁹.

Kemudian setelah itu FKUB memformulasikan paket kegiatannya yang namanya namanya Coffee Morning, dengan mengungkap intinya permasalahannya apa, dan solusi yang di harapkan nanti bagaimana itu akan di bahaas bersama dalam Coffee Morning tersebut. Dan FKUB

²⁹*Ibid.*, Pada tanggal 30, Maret 2018

sangat rajin melakukan kerja lintas sektoral tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari aktifnya Ketua FKUB Kota Bima H. Eka Iskandar, S.Ag, M.Si dengan memonitoring langsung kegiatan keagamaan yang ada di Kota Bima dengan keluar masuk gereja itu adalah yang biasa dilakukan, dan begitupula halnya dengan naik dan turun pure di Kota Bima. Al itu adalah sering dilaksanakan oleh Ketua FKUB secara langsung dengan posisi pure yang berada di atas gunung tidak menjadikan ambatan bagi Ketua FKUB beserta anggotanya dalam mengoptimalkan peranannya. Demikian juga pada saat natalan dan misa Ketua FKUB akan bercerama kepada semua pendeta dan disinilah masing-masing agama arus menguasai Kitab suci mereka masing-masing. Dengan hal itu menjadi salah satu upaya FKUB untuk mewujudkan Kerukunan antar umat beragama melalui tindakan yang tidak membedakan antara yang minoritas dan mayoritas

Seingga akan terciptanya sebuah kerukunan yang baik dalam intern maupun antar umat beragama di Kota Bima serta terwujudnya toleransi yang baik dalam setiap perbedaan yang ada, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bentuk kongkrit lain kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah kehadiran langsung Ketua FKUB Kota Bima dalam memonitoring beberapa gereja yang ada di Kota Bima pada perayaan Jum'at Agung yakni hari Paskah yang dilaksanakan oleh umat Kristiani yang ada di Kota Bima. Yang dalam kegiatan monitoringnya ikut serta

dalam persiapan dan pengamanan pada pelaksanaan perayaan paskah tersebut, dengan memonitoring dua gereja langsung

Geraja yang pertama yaitu, Gereja Masehi injil di Timur (Pendeta. Dimon Siantori) dengan berlokasi di daerah tanjung, Kota Bima dan Gereja yang kedua adalah Gereja GMIT Bethel Bima (Pendeta. Leonard Tapubesi) berlokasi di Raba. Dan itu merupakan bentuk pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di kota bima oleh FKUB.

c. Pembinaan Kelompok Ikatan Garis Keras

Sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa yang masyarakatnya plural secara agama dan etnis menunjukkan pengembangan kerukunan umat beragama senantiasa terus menjadi isu penting. Hal yang sama berlaku untuk kasus di Indonesia. Pada era reformasi isu ini menjadi lebih penting karena adanya situasi dan kondisi yang dilematis. Di satu sisi ada pengakuan dan penumbuhkembangan prinsip-prinsip masyarakat madani dan multikulturalisme, namun di sisi lain konflik-konflik masih saja terjadi baik itu bersumber dari inter ataupun antar umat beragama.

Awal dan medio 2000-an lebih di tandai dengan maraknya konflik antar umat beragama, sedangkan awal akhir 2000-an sampe 2013 lebih banyak di tandai dengan konflik internal umat islam yang melibatkan kelompok sempalan. Ketidakrukunan dengan konflik kekerasan internal umat Islam meluas bukan hanya di Jawa, seperti Kuningan,

Jakarta, Bekasi, Bogor, Situbondo, dan Sampang, namun juga di luar Jawa seperti di Lombok dan Kalimantan Tenga³⁰. Sebenarnya pemerintah telah cukup memberikan perhatian dengan menggunakan berbagai instrumen (regulasi) dan melibatkan banyak lembaga dalam upaya mengembangkan kerukunan, namun konflik atau ketidakrukunan masih terus menjadi persoalan.

Secara garis besar lembaga-lembaga yang kegiatannya terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama meliputi lembaga bentukan pemerintah dan dari masyarakat. Lembaga bentukan pemerintah misalnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD), dan Penyuluh Agama.

Namun secara khusus menganalogikan kepada konsil di lembaga sawadaya masyarakat dan medis, maka kriteria yang termasuk konsil keagamaan yaitu perkumpulan yang anggotanya merupakan keterwakilan dari sejumlah pihak, bersifat otonom dan mandiri, bertanggungjawab kepada pihak tertentu. Salah satunya yang membidangi kerukunan umat beragama (*council for armony*) mengacu kepada beberapa kelompok atau forum yang keanggotaannya merupakan perwakilan dari berbagai pihak. Dan FKUB Kota Bima termasuk dalam kriteria tersebut sehingga dalam pelaksanaan

³⁰Nawari ismail, *Menakar Peran Lembaga Pengembangan Kerukunan Umat Beragama* (Yogyakarta:Samudra Biru, 2017), hlm. 9-10.

perananya FKUB melakukan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kerukunan hidup antarumat beragama.

Salah satu kegiatan yang mengacu pada pendekatan ikatan garis keras yang di dalamnya termasuk terorisme adalah dengan pendekatan persuasif. Dengan melakukan pendekatan yang menghindari kekerasan, inilah FKUB mengadakan pembinaan yang baik dan untuk menyelesaikan kasus *terorism* dan *radikalism* itu adalah harus dengan cara yang penuh kasih sayang dan cinta. Serta yang kedua diberikan penanaman wawasan kebangsaan dan keagamaan dalam menumbuhkan kesadaran pada diri kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya adalah dengan memberikan wawasan karya, karena pada dasarnya jika diberikan paket kerja mereka tidak akan memikirkan hal yang bermacam-macam. Dan juga FKUB Kota Bima melakukan kegiatan yang persuasif serta memfokuskan juga kepada para pihak keluarga teroris dalam pendekatan tersebut. Pendekatan dan pembinaan tersebut dirasa cukup efektif dalam menjalin komunikasi dan hubungan dengan beberapa kelompok tersebut yang termasuk dalam ikatan garis keras (IGARAS).

Dan saat ini Kota Bima ini sudah tercabut dari labeling zona merah yang mengatakan bahwa Bima adalah merupakan sarang terorisme. Dengan hal ini FKUB Kota Bima dan seluruh pihak yang terkait ikut serta membantu dalam memulihkan dan memiliki peran secara

bersama-sama untuk menjadikan zona merah ini menjadi zona hijau³¹. Dalam hal ini bagaimana tatanan pemerintahan juga berperan semisalnya pada lintasan RT dan RW, mereka mempunyai ak untuk mengetahui siapa saja yang masuk dan keluar dan harus memiliki buku induk mengenai hal tersebut. Sehingga dapat terdeteksi dengan cepat siapa yang masuk dan siapa yang keluar pada suatu lokasi di Kota Bima baik, sebab jika itu tidak di lakukan dengan baik maka labeling yang di tancapkan tadi akan tertancap ulang kembali jika memang pada dasarnya kinerja dari lapisan kebawa tersebut tidak di optimalkan perannya dengan baik .

d. Pemberian dukungan Moril bagi Minoritas

Dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama FKUB Kota Bima selalu bersinergi dan berupaya memberikan yang terbaik dengan menunjukan ketidakberpihakan kepada yang mayoritas dan juga minoritas. Sebab pada hakikatnya keberadaan umat beragama tersebut adala merupakan suatu karunia yang besar dan sekaligus menjadikan manusia dapat saling bahu membahu dalam kehidupan dan keberagaman. Dan kita tidak boleh membicarakan mayoritas dan minoritas sebab akan lahir egosentris dan egosektoral yang nantinya tidak akan bisa bertemu, dan tidak akan bisa saling menghargai.

³¹ Wawancara dengan H.Eka Iskandar M.Si., (Ketua FKUB Kota Bima), Pada tanggal 04, April 2018

FKUB Kota Bima mengharapkan melalui dukungan dengan tidak keberpihakan tersebut dapat menjadi sebuah langkah yang baik. Karena pada dasarnya urusan keagamaan adalah merupakan urusan keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu, yang menjadi hal kunci dalam upaya mempertemukan perbedaan dan keberagaman tersebut adalah dengan mengarahkan keberagaman melalui kemanusiaan yang menjadikan manusia itu bisa saling berkasih sayang dengan keberagaman yang ada.

Dengan pemberian dukungan minoritas tersebut dapat meningkatkan pengembangan kerukunan antara umat beragama, contoh kasus yang pernah terjadi misalnya pada Jum'at, 17 Juli 2015 di Tolikara, yakni pembakaran masjid dan umat Islam tidak dapat menikmati indah hari raya Idul Fitri. Setelah kasus tersebut turun dan muncul melalui WA masuk Ketua FKUB Kota Bima H. Eka Iskandar S.Ag., M.Si dengan cepat mengambil tindakan terkait dengan hal itu, untuk menelpon semua tokoh lintas agama dengan ormas Islam dan juga berbagai pihak lainnya yang terkait untuk mengadakan rapat bersama dengan Dandim, Polri, Kesbag, Kesra, dan juga Kemenag³².

Selepas rapat tersebut dilaksanakan memberikan suatu al yang progressif yaitu, melahirkan Piagam Kesepahaman Tokoh Lintas Agama di Kota Bima, piagam tersebut dikirim langsung dan ditunjukkan

³² *Ibid.*, Wawancara Pada tanggal 28, Maret 2018

kepada pak Jokowi agar ini untuk diperhatikan. Dengan isi piagam yang salah satunya adalah terkait dengan kelompok minoritas itu di Kota Bima Bima yang hidupnya aman, damai, rukun, dan juga interaksi antarumat beragama sangat baik dan FKUB melindungi tokoh-tokoh umat agama lain. Dengan pemberian dukungan moril tersebut, bahwa minoritas tidak menjadi batasan dan hambatan dalam menjalankan peribadatan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. H. Eka Iskandar S.Ag., M.Si selaku ketua FKUB Kota Bima, memberikan dukungan terhadap umat Kristiani di Kota Bima dalam merayakan Hari Raya Paskah.

Dukungan moril itu berupa pernyataan melalui media dan pers untuk menegaskan bahwa perayaan Hari Paskah akan berjalan aman, tertib, lancar dan sukses. Dan juga melalui tulisan ucapan “Selamat menjalankan dan merayakan Hari Paskah kepada umat Kristiani” pada *Banneryang* terpasang di salah satu gereja yang ada di Kota Bima. Pemberian dukungan ini juga terlihat pada Hari-hari besar lainnya seperti Natal dan Misa pada umat Kristiani, dan perayaan Nyepi pada Umat Hindu. Pertimbangan pemberian dukungan moril tersebut dikarenakan perayaan Paskah pada tanggal 30 Maret 2018 menjadi momentum untuk memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan antar sesama umat beragama, sekaligus juga agar terciptanya suasana yang kondusif. Dalam perayaan Paskah ini Ketua FKUB Kota Bima memonitoring langsung kepada beberapa gereja yang ada di

Kota Bima pada malam sebelum perayaan dan sekaligus pada hari Jum'at agung tersebut berlangsung. Sehingga umat kristiani tetap merasa aman dan nyaman selama melaksanakan peribadatnya, sekaligus termasuk juga mengormati serta mengagahi umat kristiani yang melaksanakan perayaan Paskah tersebut. Bukan hanya itu aja pihak dari kepolisian juga ikut serta dalam pengamanan Perayaan paskah tersebut yaitu Polres, dan Polsek Kota Bima. Dalam hal ini Kapolres Kota Bima Bagus Winarta menyampaikan bahwa pihak kepolisian wajib dalam memberikan pengamanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bima, sekaligus memberikan keamanan dalam berbagai kegiatan keagamaan yang berlangsung baik dari agama Kristen ataupun agama-agama lainnya yang ada di Kota Bima³³

e. Sosialisasi FKUB

Kerukunan hidup beragama merupakan proyek pemerintah yang dimulai pada masa Orde Baru yang bertujuan untuk membina dan melanggengkan kerukunan dan harmoni di antara umat beragama. Pemerintah pada waktu itu mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Dan FKUB pada dasarnya didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga

³³Wawancara dengan Bagus Winarta, (KAPOLRES Kota Bima). Pada tanggal 30, Maret 2018

bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama³⁴. Misalnya FKUB berusaha untuk mensosialisasikan tentang pentingnya kerukunan kepada anggotanya agar setiap perwakilan anggota kelompok selalu menjaga kerukunan, sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB ke kelompok umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan mensosialisasikan terkait persoalan kerukunan umat beragama tersebut kepada umatnya agar menjaga toleransi baik antar umat beragama maupun internal umat beragama.

Dengan hal itu artinya, FKUB secara tidak langsung berperan dalam kerukunan antar umat beragama mencakup juga kerukunan internal umat beragama. Karena itulah FKUB Kota Bima giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan FKUB di Kota Bima, dengan tidak kenal lelah selalu mensosialisasikan juga terkait dengan eksistensi FKUB.

Karena masih ada sebagian orang dan masyarakat yang belum mengetahui, bahkan cenderung masih memandang sebelah mata terhadap keberadaan FKUB, dan ini menjadi tantangan bagi FKUB untuk melakukan akselerasi antara program kerja melalui sosialisasi. Agar bagaimana masyarakat bisa paham, dan tentunya tokoh lintas agama juga paham, bagaimana tokoh islam, ormas-ormas islam paham juga bahwa ini yang mengatur FKUB dan masyarakat untuk berinteraksi.

³⁴Nawari ismail, *Menakar Peran Lembaga Pengembangan Kerukunan Umat Beragama* (Yogyakarta:Samudra biru. 2017), hlm. 96

Sosialisasi selalu melibatkan tokoh lintas agama, dan juga ormas islam karena memang tokoh ormas islam, tokoh pemuda, dan tokoh wanita di masukan dalam kepengurusan FKUB Kota Bima³⁵.

Sehingga yang menjadi akar penguatan pada tugas pokok dan fungsinya FKUB Kota Bima menjalankan dan mengoptimalkan peranannya malui kegiatan sosialisasi tersebutdalam rangka upaya pengendalia konflik dan pemeliharaan kerukunan antara umat beragama di Kota Bima, yang nantinya dapat menumbukan toleransi yang kuat serta terwujudnya kehidupan yang baik dalam intern dan umat beragama yang ada di Kota Bima. Sekaligus masyarakat dan sebagaian orang yang belum mengetahui dan mengenal FKUB dapat lebih tahu dan memahami akan pentingnya keberadaan FKUB di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

2. Program Kerja FKUB Kota Bima Selama Taun 2016-2017

Kota Bima dari tahun 2016 sampai dengan 2017 tidak terjadi konflik-konflik antar umat beragama, karena kesadaran warganya yang semakin hari semakin baik tentang pentingnya toleransi di antara pemeluk agama. Walaupun terjadi konflik aupun pertikaian bukan dikarenakan agama, melainkan lebih kepada persoalan politik ataupun permasalahan komunal.

³⁵Wawancara dengan Eki dan H.Eka Iskandar M.Si., (Anggota dan Ketua FKUB Kota Bima). Pada tanggal 04, April 2018

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FKUB Kota Bima selama 2016 hingga 2017, dalam mencegah dan menanggulangi konflik umat beragama di Kota Bima yaitu berupa kegiatan dialog keagamaan, rapat rutin pengurus FKUB, menampung aspirasi ormas, pendekatan persuasif kerja lintas sektoral dan mengeluarkan rekomendasi tertulis untuk ruma ibadah.

Selain itu juga kegiatan mensosialisasikan isi dari PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006, melalui ceramah yang dilakukan oleh tokoh agama yang tergabung dalam kepengurusan FKUB³⁶. Selain itu juga FKUB terus berupaya melaksanakan kegiatan yang berubungan untuk mempererat ubungan baik diantara umat beragama, sehingga dapat mencegah dan menanggulangi konflik umat beragama di Kota Bima seperti dengan hubungan interaksi sosial.

Dengan itu interaksi antar umat beragama itu dapat berjalan dengan baik, dan para pendeta dari masing-masing agama datang kerumah kami masing-masing untuk bersilahturahmi begitupun juga sebaliknya. Hal yang dilakukan merupakan perwujudan dari kerukunan dalam internal Anggota FKUB terlebih dahulu baru membawa mengenai kerukunan yang ada di masyarakat Kota Bima.

Semua hal itu dilakukan dengan detail untuk ikut megawasi sampai kepada hal-hal kecil agar tidak terjadinya konflik berupa tawuran di anatra

³⁶ *Ibid.*,

pemuda, yang pada dasarnya al-al kecil tersebutlah yang dapat menimbulkan konflik, dan memungkinkan juga unuk mengarah kepada konflik antar umat beargama. Dan kebiasaan di Bima jika terjadi perkelahian antar personal maka bisa menjadi perkelaaian antar kampung, seingga konflik komunal tersebut yang paling rawan terjadi dan mudah membakar serta berbahaya dalam keidupan kerukunan internal umat maupun antar umat beragama yang adi Kota Bima.

Dalam pendekatan kerja lintas sektoral ditunjukkan ketika melaksanakan sholat idl fitri dan hari raya yang menjaganya adalah tokoh pemuda lintas agama, dalam rangka mebantu tugas TNI dan Polri, Dishub dalam ikut serta perayaan idul fitri, dan begitu juga pada umat kristiani saat menjalakan perayaan Natal, kaum muslim dan hindu yang ikut dalam menjaga selama perayaan tersebut berlangsung.

Semua diperlakukan dengan sama, karena kita mengharagai negara Indonesia, sebab konflik yang muncul dapat merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bagi FKUB Kota Bima NKRI adalah harga mati dan pancasila itu mutlak untuk diterima bersama seluruh masyarakat yang ada di Indonesia³⁷

³⁷ *Ibid*, Wawancara pada tanggal 04, April 2018

Periodesasi FKUB sudah dua kali pemilihan, dalam satu periodesisasi itu adalah selama lima tahun, 2006-2011/2011-2017. Dan FKUB Sempat fakum ada kelonggaran tidak di SK kan yaitu pada tahun tersebut. Dan baru pada tahun 2014 kemaren di SK sampai dengan nanti 2019.

Adapun kegiatan lainnya yang pernah di lakukan selama 2016 hingga 2018 ini adalah berupa empat program besar yang menjadi program kerja FKUB Kota Bima yaitu:

- a. Pembenahan kesekretariatan. Pembenahan kesekretariatan ini dilaksanakan untuk membantu FKUB dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan mudah. Sekaligus dengan tujuan untuk dapat meluaskan pendekatan, sebab jika ada terjadi apa-apa FKUB dapat segera memonitoring kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik dan permasalahan antar yang lainnya. Jika terjadi ada hal-hal yang mengancam kerukunan anatar umat beragama maka segera di komunikasikan langsung dengan cepat, dengan itu dapat menjalin relasi yang baik dengan berbagai kalangan. Untuk pembenaan fasilitas tersebut FKUB sekarang berupaya untuk pembangunan aula FKUB yang saat ini hanya mampu menampung 70 orang dan kira-kira pada pembangunan selanjutnya ingin melebarkan hingga kurang lebih memuat 100 kursi, dengan fasilitas wifi, dan sumber dana yang berasal dari hibah sosial³⁸

³⁸*Ibid.*, Wawancara Pada tanggal 28, Maret 2018

b. Kerja Lintas Sektoral. FKUB Kota Bima dalam upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di Kota Bima melakukan pendekatan persuasif yang menfokuskan kepada para pihak keluarga teroris. Melalui pendekatan persuasif yang sudah di jelaskan sebelumnya inila FKUB dapat mengembangkan peranannya dalam upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di butukan sebua tim yang kuat. Untuk itu FKUB melaksanakan kerja lintas sektoral dengan memfasilitasi dan mengundang semua elemen dari TNI Dan POLRI Kesra, Kemenag, Tokoh Lintas Agama, Tokoh Intern Umat Islam Dari Masing-Masing Ormas, untuk mengadakan pertemuan dan mebicarakan hal yang sedang terajadi dan sekaligus mencarikan solusinya. Dengan mengundang semua piak dan elemen tersebut menadakanbawa tidak ada yang ditutup-tupi karena FKUB bicara secara terbuka melalui pertemuan yang diagendakan tersebut, sehingga pada akhirnya itu di desain dan masuk dalam program kerja FKUB. Pihak-pihak yang terkait dalam kerja lintas sektoral adalah pihak dari Mabes POLRI, BAIS, dan BIN mereka merupakan patner utama dalam rangka pengenedalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama. Melalui deteksi dini oleh Kesbangpol dan FKUB merayap untuk upaya bagaimana agar tidak terjadinya konflik antar umat beragama di Kota Bima.

c. Dialog Keagamaan. Adapun dialog keagamaan yang pernah dilaksanakan oleh FKUB pada tahun 2016-2017 adalah berbagai dialog lintas agama dengan tema disesuaikan dengan kondisional yang muncul dan tokoh yang diundang tokoh lintas masyarakat. Dan FKUB menyampaikan dengan bahasa yang halus dalam melaksanakan dialog tersebut. Sehingga dalam pemberian rekomendasi pembangunan rumah ibadah orang yang ditolak tidak akan merasa keberatan karena ditolak, dan orang yang tidak diberi rekomendasi tidak merasa sakit ketika rekomendasi tidak diterima oleh FKUB³⁹. Kemudian dialog terbaru yang baru saja dilaksanakan oleh FKUB Kota Bima adalah dialog pada tanggal 04, April 2018 adalah “Dialog Lintas Etnik, Budaya, dan Agama” dengan tema menghadirkan narasumber dari Provinsi yaitu . Suwardi S., M.Pd bidang Kasubag. Kemenag Provinsi NTB yang membahas mengenai konflik dan bagaimana memaami terjadinya konflik. Serta narasumber yang kedua adalah dari Wakapolres Kota Bima membahas mengenai penyebaran isu dan hoax sebagai bentuk ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu kerukunan antar umat beragama di Kota Bima. Sehingga FKUB dalam hal ini akan memberikan penyelesaian berupa *win-win solution* pada setiap kasus yang terjadi⁴⁰.

³⁹ *Ibid*, Wawancara Pada tanggal 04, April 2018

⁴⁰ Wawancara dengan Suwardi M.Pd, (Kasubag Kemenag Provinsi NTB). Pada tgl 04, April 2018

d. Cofee Monring. Program Cofee Morning merupakan unggulan dari program kerja FKUB Kota Bima, karena itu menjadi program yang selalu ada tetapi inti materinya yang berbeda dan tidak dimunculkan tetapi inti kasusnya kita sampaikan dala kegiatan cofee morning tersebut. Dan semua anggota FKUB ikut aktif dalam segala kegiatan Forum Group Disscousion (FGD). Anggota aktif FKUB 17 orang terdiri dari Forum gereja kristen 9 orang, Hindu 3 orang dan Katolik 3 orang. Pesertanya terdiri dari Nadatul Ulama (NU), Muhammdiyah, PERSIS. Dengan peserta diskusi kurang lebih 50-an peserta. Serta turut ikut juga mengundang ormas islam dan tokoh lintas agama⁴¹. Selain kegiatan cofee monring, FKUB juga menangani mengenai pembangunan rumah ibadat, jika ada permasalahan itu kita panngil jika ada terkait dengan penistaan agama maka dipanggil juga tokoh pemudanya. Dan untuk saat ini FKUB Kota Bima tengah mendata rumah ibadah yang belum diberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah baik di muslim maupun non muslim untuk diberikan rekomendasinya. Dan ini merupakan tugas sangat berat. Kenapa dikatakan berat karena butuh tenaga banyak untuk melihat dan FKUB membuatkan rekomendasi kalau masjid itu memberikan stempel, sehingga tidak ada pertayaan mengenai legalistas formal.

⁴¹Wawancara dengan H.Eka Iskandar M.Si, (Ketua FKUB Kota Bima), Pada tanggal 28, Maret 2018

- e. FKUB Road To School. FKUB Road to school merupakan sebuah ajang sosialisasi terhadap eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di masing-masing sekolah dalam semua tingkatan. Selama ini FKUB Kota Bima hanya memanggil perwakilan di masing-masing pengurus OSIS, FKUB road to school ini melibatkan TNI/POLRI, Dinas Pendidikan dan Kemenag Kota Bima beserta Tokoh masyarakat dan juga pengurus FKUB Kota Bima. Sebelum acara ini dilaksanakan pada tanggal Selasa 17, April 2018 mendatang FKUB mengadakan rapat bersama dengan di hadirinya kurang lebih 20 anggota yang terdiri dari; Dandim 1608 Kota Bima, Letkol inf. Bambang, dari Diknas Kota Bima, Wakapolres Kota Bima, serta Kepala sekolah SMA/SMK Negeri yang ada di Kota Bima. Dalam acara FKUB road to school, terdapat beberapa poin materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber yaitu khususnya Dandim 1608 Kota Bima mengenai meliputi materi tentang ketahanan Bangsa dan Daerah untuk mewujudkan ketahanan Nasional dalam mempertahankan NKRI di Kota Bima, kemudian materi dari Polresta Kota Bima meliputi materi Bahaya Narkoba, Sex Bebas dan Peran Pemuda dalam pemberdayaan mereka untuk mengisi Pembangunan Bangsa dan daerah, Dinas Pendidikan dan Kemenag melakukan kontroling bersama di masing-masing sekolah dan Madrasah selama kegiatan

FKUB Road To School. Selanjutnya Tokoh Masyarakat atau FKUB akan merajut kerukunan dengan nilai ksasih sayang antar pemuda untuk menghindari konflik sosial di sekolah. Dan dalam kegiatan tersebut nantinya akan ada door price, bagi para 4 peserta dari siswa yang bertanya⁴². Rapat yang diadakan oleh FKUB tersebut menghasilkan beberapa poin penting dalam pelaksanaan FKUB Road To school yaitu, penggeseran jadwal dari hari pertama pelaksanaan di ganti menjadi hari Rabu, tanggal 18, April 2018 karena pada hari itu bertepatan dengan jadwal debat terbuka calon Wali Kota Bima periode mendatang. Kemudian Dandim 1608 Kota Bima menyampaikan pernyataan bahwa secara umum kota bima cukup bagus kondisinya hanya saja diperluka kerjasama untuk menyelesaikan beberapa titik lokasi wilayah tertentu untuk lebih baik. Sedangkan Polresta Kota Bima menyambut baik kegiatan FKUB Road To School dan satu visi dengan program Polresta Kota Bima tentang Pembinaan Remaja, konektivitas dengan kegiatan Polresta Kota Bima. Melalui kegiatan FKUB Road To School ini, FKUB Kota menunjukkan bahwa ada eksistensi yang benar-benar FKUB Kota Bima sebagai salah satu bentuk upaya dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama di Kota Bima. Bukan hanya itu saja, FKUB Kota Bima juga merencanakan kegiatan FKUB Road To Camat yang dimana akan

⁴² Pada Tanggal 12, April 2018

di hadirkan Lura dan juga RT dari masing-masing Kecamatan yang ada di Kota Bima. Dan agenda ini akan di selenggarakan setela berhasil terlaksananya kegiatan FKUB Road To Camat.

- f. Studi Banding. Dan terakhir program kerja dari FKUB Kota Bima adalah studi banding. Studi banding untuk belajar mengenai kerukunan umat beragama dengan menambah khazanah ilmu. Melalui studi banding ini diharapkan dapat menambah wawasan pengalaman dari luar untuk memperkaya bagaimana FKUB dalam mendesain kerukunan umat beragama yang ada di kota Bima. Dan dalam merealisasikan program kerja dengan studi banding itu, FKUB mengalokasikan sebagian anggaran untuk studi Banding ke beberapa wilayah lain di Indonesia agar dapat melahirkan ide-ide serta terbuka wawasannya mengenai kerukunan dan keberagaman yang ada di wilayah lain di Indonesia.. Dan program tersebut menjadi program tahunan untuk studi banding ke wilayah-wilayah di Indonesia, belajar mengenai kerukunan umat beragama. Dan FKUB Kota Bima selanjutnya akan melaksanakan studi banding ke Kalimantan Selatan, kenapa memilih Kalimantan Selatan. Karena pada tahun 2016 lalu FKUBnya mengunjungi FKUB Kota Bima. Oleh karena itu, ini merupakan bentuk kunjungan balik dari FKUB⁴³.

⁴³ *Ibid*, Wawancara Pada Tanggal 04, April 2018

Untuk peserta yang mengikuti studi banding tersebut terdiri dari kelompok lintas agama, Kejari, Ketua Pengadilan. Dan dalam sekali jalan untuk studi banding tersebut FKUB Kota Bima kurang lebih dari 20 peserta, dan studi banding ini benar-benar memberikan dampak positif.

E. Kendala yang Dihadapi FKUB Kota Bima

FKUB Kota Bima sebagai forum yang membantu pemerintah ,dalam pengembangan kerukunan umat beragama di Kota Bima, dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak serta merta selalu berjalan lancar dalam menjalankan peran dan tugas pokoknya. Tetapi melalui berbagai kegiatan dan juga pendekatan-pendekatan yang di lakukan ole FKUB Kota Bima menjadikan kendala-kendala yang mungkin saja bisa terjadi tersebut dapat di tangani dengan baik dengan tidak adanya ditemui kendala-kendala yang berarti yang dapat menjadi pengambat dalam pengoptimalan peranan dari FKUB sendiri.

Hal-hal yang menjadikan kendala tersebut tidak berarti dan tidak ditemukan dalam FKUB Kota Bima, karena ada beberapa faktor pemacunya yang terbagi atas dua yaitu, secara internal dan secara eksternal. Faktor secara internal, yaitu:

1. Keaktifan pengurus FKUB Kota Bima merupakan salah satu hal pemacu tidak ditemuinya kendala atau hambatan yang dihadapi ole FKUB dalam mengoptimalkan perannya, yaitu di tandai dengan tingkat keaktifan dari pengurus FKUB itu sendiri. Keaktifan dari semua tokoh agama yang tergabung dalam kepengurusan FKUB, mejadi salahsatu faktor penentu

keoptimalan FKUB dalam menjalankan peranannya untuk pengembangan kerukunan umat beragama. FKUB.⁴⁴ Adapun yang menyebabkan FKUB Kota Bima optimal dalam menjalankan peranannya, adalah dikarenakan semua anggota dari FKUB Kota Bima yang telah terpilih dan dilantik lebih fokus dan tidak memiliki kesibukan masing-masing yang ada diluar sehingga lebih fokus dan menjalankan tugasnya di FKUB.

2. Tidak adanya perbedaan persepsi di antara anggota FKUB Kota Bima. Setiap orang memang selalu akan memiliki perbedaan dalam persepsi dan pandangan yang bisa saja sama dan juga berbeda. Sehingga dalam ini FKUB Kota Bima mampu menyatukan persepsi tersebut dengan kembali dan didasarkan pada menafsirkan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006. Untuk itu dalam menemukan jalan keluar untuk sebuah permasalahan yang terjadi di Kota Bima, biasanya anggota FKUB tidak harus dengan perdebatan yang rumit, melainkan melalui komunikasi yang interaktif dan juga pendekatan persuasif⁴⁵.
3. Kegiatan-kegiatan selama ini selalu berupaya memberikan kegiatan yang edukatif dan fokusnya tidak hanya kepada toko agama saja, melainkan juga melibatkan berbagai tokoh-tokoh dan ormas yang lainya. Dan dalam rangka mengoptimalkan peranannya FKUB Kota Bima juga menghadirkan tokoh perempuan pada setiap kegiatan lintas komunikasi

⁴⁴ Wawancara dengan Eki (Anggota FKUB Kota Bima Dari Golongan Protestan), Pada tanggal 30, Maret 2018

⁴⁵ Ibid., Pada tanggal 28, Maret 2018

yang rutin FKUB kota Bima laksanakan⁴⁶. Sekaligus juga berharap hal ini dapat berguna dalam pemeliharaan kerukunan dan budaya toleransi diantara umat beragama di Kota Bima.

Selain faktor internal yang menjadi pemacu peran FKUB Kota Bima dalam mengoptimalkan perannya, terdapat pula faktor eksternal yang dihadapi. Faktor eksternal, tersebut yakni:

1. Letak Geografis. Kota Bima sebagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah otonom yang sedang giat melakukan pembangunan pada tatanan pemerintahan dan masyarakatnya, menjadikan Kota Bima strategis dengan daerah atau kecematan yang tidak terlalu terpisah serta lokasi sekretariat FKUB yang berada di tengah Kota dan Pusat kantor pemerintahan. Menjadikan salah satu faktor pemacu FKUB Kota Bima dalam mengembangkan kerukunan di Kota ini.
2. Kebijakan Politik. Politik dari pemerintah Kota Bima merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi pemacu peran FKUB, dalam pengoptimalannya perannya. Hal ini karena kebijakan politik oleh orang-orang pemangku kekuasaan di Kota Bima justru dapat bekerja sama dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hal ini berdampak pada kelancaran FKUB dalam menjalankan tugas

⁴⁶Wawancara dengan Sudirman, (Tokoh inspirator KUB Kota Bima), Pada tanggal 04, April 2018

dan peranannya, serta kinerjanya dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama di Kota Bima.

3. Kehidupan masyarakat Kota Bima. Kehidupan masyarakat Kota Bima yang terbilang tidak terlalu tertutup dan juga terbuka pada kehidupan yang modern saat ini, menjadikan masyarakat Kota Bima tetap mempertahankan nilai-nilai leluhur dan adat istiadat serta kebudayaan asli Kota Bima (*Mbojo*). Kebiasaan hidup yang rukun dan saling bahu membahu dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat, Hubungan kekerabatan dengan anggota masyarakat dalam lingkungan masyarakat Bima sangat kuat keberadaannya, dimana bentuk hubungan ini adalah bentuk hubungan saling tolong-menolong, gotong-royong, musyawarah untuk mufakat dan lain sebagainya. Pola kekerabatan yang ada pada masyarakat Bima bisa dilihat dari rutinitas non fisik keseharian masyarakatnya berupa pelibatan seluruh masyarakat dalam beberapa kegiatan yang diadakan di tengah-tengah masyarakat. Misalnyasala satu contohnya adala, apabila ada salah satu keluarga yang akan melakukan hajatan seperti sunatan atau hitanan dan perkawinan maka seluruh masyarakat akan ikut terlibat. Sehingga hal inilah yang menjadikan masyarakat Kota Bima dapat hidup rukun dan damai dalam bertoleransi.
4. Terdapatnya sarana yang dapat menjadi wadah dalam menampung aspirasi masyarakat. Sala satunya adala melalui diskusi dan dialog

yang di adakan ole FKUB, menjadi faktor pemacu secara eksternal dan dapat menampung aspirasi masyarakat, sehingga aspirasi yang dimiliki oleh masyarakatpun dapat tersalurkan. Al inipun berdampak pada minimnya terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat, karena keinginan-keinginan dari masyarakat maupun kersaanya yang dialami masyarakat Kota Bima dapat disalurkan dengan baik.

5. Terlibatnya organisasi-organisasi keagamaan dan aliran-aliran serta toko agama dan masyarakat dalam kegiatan FKUB dan pemaaman pada masyarakat dan toleransi yang sama, sehingga tidak mengganggu kerukunan hidup umat beragama yang telah terbina di masyarakat Kota Bima. Beberapa organisasi tersebut memahami agamanya sesuai dengan pemahaman agama dan identitas agamanya. Dan tidak mengklaim pemahaman agama mana yang paling benar dan juga mengakui maupun menerima kehadiran agama lainya yang di akui di Negara Republik Indonesia ini, dan kembali kepada keyakinan bahwa Indonesia adalah negara yang berBineka Tunggal Ika "Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu". Sehingga hal ini mampu menumbukan nilai-nilai toleransi yang baik di masyarakat.

Berdasarkan beberapa faktor-faktor di atas menjadikan FKUB Kota Bima tidak menemukan kendala yang berarti dalam menjalankan perannya, hanya saja di butukan penguatan dalam permasalahan

payung ukum. Dan di harapkan PBM No.9 dan No.8 tersebut dapat naik statusnya menjadi peraturan pemerintah⁴⁷.

Sehingga FKUB lebih kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebab FKUB pada dasarnya didesain khusus untuk bertugas mengembangkan kerukunan umat beragama, khususnya lagi pada kerukunan eksternal umat beragama. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuan dengan kerukunan internal umat beragama.

⁴⁷Wawancara dengan H.Eka Iskandar M.Si., (Ketua FKUB Kota Bima), Pada tanggal 28, Maret 2018

F. Pembahasan

Dalam mencegah dan menanggulangi konflik umat beragama di Kota Bima, FKUB Kota Bima berupaya melakukan serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan baik di interen maupun antara umat beragama. Peranan dari FKUB Kota Bima pun mengacu pada peranan ideal dari sebuah FKUB di Kabupaten/Kota di Indonesia.

Salasatu peranan yang di laksanakan FKUB Kota Bima ialah dalam menyelesaikan kasus yang terjadi pada taun 2017 kemarn. Bahwa ada seorang jemaat gereja yang tiggal di atas gunung dan melaksanan peribadatan di gereja. Karena posisi tempat tinggal dengan geraja yang cukup jauh. Sehingga denan tidak sengaja seorang jemaat tersebut menggunakan tudung kepala yang menutup kuping karena kedinginan. Dan terjadila penyebaran informasi Kota/Kabupaten Bima Bahwa muslim di suruh untuk masuk kedalam gereja.

Berdasarkan permasalahan tersebut FKUB Kota Bima dengan segera mengkomunikasikan dengan pendeta yang berhubungan langsung dengan gereja tersebut. Kapolri dan forum gereja untuk mencari akar permasalahan yang sebenarnya terjadi sehingga dapat ditemukan penyelesaiannya. Begitu kasus tersebut suda tersebarluas. Ketua FKUB Kota Bima dengan segera meminta pendeta untuk membuat pernyataan permintaan maaf, bawa dan tidak ada terjadi kasus seperti yang telah di isukan. Jemaat gereja tersebut bernama

ibu Sofiah, karena keselapaaman dan penyebaran isu Kota Bima hampir buming. Namun hal itu dapat diselasikan dengan cepat oleh FKUB Kota Bima

Oleh karena itu sangat gampangnya berita hoax itu tersebar melauai penyebaran isu pada kasu-kasus yang sebenarnya sangat rawan dalam mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama. Namun, karena sering di lakukanya komunikasi dua arah dan endekatan persuasif serta kerja lintas sekoral dapat mendeteksi dengan cepat teradap kasus-kasus yang rawan konflik, yang dapat mengganggu kerukunan antar umat bergama.

Berbagai peranan yang dilaksanakan ole FKUB Kota Bima pun terlihat dari serangkaian kegiatan yang perna digelar ole FKUB Kota Bima, seperti rapat rutin FKUB Kota Bima untuk membahas berbagai isu permasalahan keagamaan yang terjadi di Kota Bima, dialog-dialog keagamaan, menampung aspirasi ormas dan menyalurkannya, mensosialisasi PBM No.9 dan No.8 Tahun 2016, serta menuliskan rekomendai tertulis untuk pendirian rumah ibadah. Melalui pendekatan persuasif juga FKUB Kota Bima cukup efektif dalam mencega dan menanggulangi terjadinya konflik di Kota Bima.

Gaya manajamen konflik yang baik melalui pendekatan persuasif ini memberikan dampak yang positif teradap kerukunan antar umat beragama di Kota Bima. Pendekatan persuasif tersebut dilakukan kepada masing-masing pimpinan agama yang ada di Kota Bima yaitu dengan di ajak diskusi dan di ikuetsertakan dalam komposisi kepengurusan FKUB Kota Bima. Pendekatan

persuasif menjadi salah satu langkah efektif dalam upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Bima.

Melalui pendekatan tersebut FKUB Kota Bima dapat menempatkan bahwa tidak adanya keberpihakan terhadap kaum mayoritas ataupun minoritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga menumbuhkan kepercayaan antar satu sama yang lainnya dengan tidak menempatkan kepentingan pribadi atas kepentingan orang lain, dan juga melalui pendekatan persuasif itulah FKUB Kota Bima dapat mengaselerasikan eksistensinya.

FKUB Kota Bima juga dalam upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di Kota Bima melakukan pendekatan persuasif yang menfokuskan kepada para pihak keluarag teroris. Melalui pendekatan persuasif yang suda di jelaskan sebelumnya inilah FKUB dapat mengembangkan peranannya dalam upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di butukan sebuah tim yang kuat. Untuk itu FKUB melaksanakan kerja lintas sektoral dengan memfasilitasi dan mengundang semua elemen dari TNI Dan POLRI Kesra, Kemenag, Tokoh Lintas Agama, Tokoh Intern Umat Islam Dari Masing-Masing Ormas, untuk mengadakan pertemuan dan mebicarakan hal yang sedang terajadi dan sekaligus mencari solusi.

Dengan mengundang semua pihak dan elemen tersebut menadakanbawa tidak ada yang ditutup-tupi. Dan Pihak-pihak yang terkait dalam kerja lintas sektoral adalah Mabes POLRI, BAIS, dan BIN. Melalui deteksi dini oleh

Kesbangpol dan FKUB merayap untuk upaya bagaimana agar tidak terjadinya konflik antar umat beragama di Kota Bima.

FKUB Kota Bima dalam menjalankan peranan aktualnya dalam mencegah dan menanggulangi konflik di Kota Bima, adala sebagai berikut:

1. Melakukan Dialog Keagamaan

FKUB Kota Bima dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga, dan mengembangkan kerukunan umat beragama di Kota Bima telah melalukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan peranannya, salah satunya berperan dalam melakukan dialog keagamaan.

Dalam al ini FKUB Kota Bima sejak taun 2016 ingga 2018 telah melakuka berbagai dialog keagamaan baik yang secara formal maupun secara informal dengan toko-toko agama dan masyarakat yang ada di Kota Bima. Dialog keagamaan ini pun sangat membantu sekali FKUB dalam menjaga dan mencega terjadinya konflik umat beragama di Kota Bima.

Berdasarkan dialog-dialog keagaman yang dilaksanakan oleh FKUB yang melibatkan toko agama dan toko masyarakat, serta tokoh masyarakat Kota Bima. Adapun dialog keagamaan yang perna dilaksanakan ole FKUB pada taun 2016-2017 adala berbagai dialog lintas agama dengan tema disesuaikan dengan kondisional yang muncul dan tokoh yang di undang tokoh lintas masyarakat. Dan FKUB meyampaikan dengan bahasa yanggg halus dalam melaksanakan dialog tersebut.

Sehingga dalam pemberian rekomendasi pembangunan rumah ibadah orang yang ditolak tidak akan merasa keberatan karena di tolak, dan orang yang tidak diberi rekomendasi tidak merasa sakit ketika rekomendasi tidak diterima oleh FKUB . Kemudian dialog terbaru yang baru saja di laksanakan oleh FKUB Kota Bima adalah dilaoag pada tanggal 04, April 2018 adalah “Dialog Lintas Etnik, Budaya, dan Agama” dengan dengan tema menghadirkan narasumber dari Provinsi yaitu . Suwardi S.,M.Pd bidang Kasubag. Kemenag Provinsi NTB yang membahas mengenai konflik dan bagaimana memaami terjadinya konflik. Serta narasumber yang kedua adalah dari Wakapolres Kota Bima membahas mengenai penyebaran isu dan hoax sebagai bentuk ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu kerukunan antar umat beragama di Kota Bima.

Selain kegiatan dialog keagamaan yang digelar FKUB Kota Bima, FKUB Kota Bima juga secara rutin melaksanakan dialog secara internal melalui Program Cofee Morning yang merupakan unggulan dari program kerja FKUB Kota Bima, program yang selalu ada tetapi inti materinya yang berbeda dan tidak dimunculkan tetapi inti kasusnya di sampaikan dala kegiatan cofee morning tersebut. Semua anggota FKUB aktif dalam segala kegiatan Forum Group Disscousion (FGD). Anggota FKUB 17 orang terdiri dari Forum gereja kristen 9 orang, Hindu 3 orang dan Katolik 3 orang. Pesertanya terdiri dari Nadatul Ulama (NU), Muhammdiyah, PERSIS. Dengan peserta diskusi kurang lebih 50-an peserta. Serta turut ikut juga mengundang ormas islam dan tokoh lintas agama.

Untuk itu melalui dialog-dilaog yang digelar ole FKUB tersebut, FKUB Kota Ternate bisa memperoleh berbagai informasi seputar isu-isu yang berkembang di masyarakat yang kemungkinannya dapat memicu konflik baik di intern ataupun antara umat beragama, selain itu melalui dialog juga FKUB Kota Bima dapat memperoleh berbagai solusi dalam memecakan sebuah permasalahan keagamaan yang terjadi pada umat beragama di Kota Bima. Adapun melalui dialog keagamaan ini juga sebagai salah satu langka dari FKUB Kota Bima dalam mencegah terjadinya konflik-konflik umat beragama di Kota Bima, karena melalui dialog keagamaan dapat mempererat ubungan silaturami dan tolerasnsi di intern maupun antar beragama.

Dilaog keagamaan ini juga dapat menjadi upaya atau langka dalam penanggulangan konflik umat beragama. Al ini terlihat dari FKUB Kota Bima dalam penyelesaian beberapa kasus yang dapat menimbulkan konflik seperti Jemaat gereja bernama ibu Sofiah, karena keselapaaman dan penyebaran isu yang terjadi pada taun 2017 lalu di Kota Bima.

2. Menampung Aspirasi Ormas Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat

Sala satu peranan yang harus dilakukan ole FKUB Kota Bima, yaitu menampung aspirasi dari ormas keagamaan dan masyarakat yang ada di Kota Bima. Dalam hal ini pengurus FKUB Kota Bima terus berupaya untuk dapat menampung aspirasi dari ormas dan masyarakat yang berubungan dengan permasalahan keagamaan. Peranan yang dijalankan ole

FKUB Kota dalam menampung aspirasi ini dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada ormas dan masyarakat untuk secara bebas menyampaikan aspirasinya kepada pengurus FKUB. Sehingga peran dalam menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat ini terlaksana dengan baik oleh FKUB Kota Bima.

Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya konflik umat beragama di Kota Bima, dikarenakan melalui aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat yang ditampung oleh FKUB dapat disalurkan kemudian oleh FKUB melalui peran ketiga dari FKUB Kota Bima yaitu menyalurkan aspirasi ormas dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepada walikota atau pemerintah yang kemudian akan dicarikan solusi atas sebuah permasalahan tersebut, sehingga tidak merembet kepada sebuah konflik. Dan peranan ini sudah dilakukan secara optimal oleh FKUB Kota Bima, dan tidak ditemuinya kendala yang berarti dalam pengoptimalan perannya tersebut.

3. Menyalurkan Aspirasi Ormas Keagamaan dan Masyarakat Dalam Bentuk Rekomendasi Sebagai Bahan Kebijakan Walikota

FKUB Kota Bima dalam menjalankan peranan ketiganya ini, salah satu contohnya yang pernah dilakukan oleh FKUB Kota Bima adalah membuat piagam kesepahaman tokoh lintas agama di Kota Bima, piagam tersebut dikirim langsung dan ditunjukkan kepada Pak Jokowi agar hal ini untuk diperhatikan. Dengan isi piagam yang salah satunya adalah terkait

dengan kelompok minoritas itu di Kota Bima Bima yang hidupnya aman, damai, rukun, dan juga interaksi antarumat beragama sangat baik dan FKUB melindungi tokoh-tokoh umat agama lain.

FKUB Kota Bima melakukan FKUB Kota Bima tengah mendata rumah ibadah yang belum diberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah baik di muslim maupun non muslim untuk diberikan rekomendasinya. Dan ini merupakan tugas sangat berat. Kenapa dikatakan berat karena butuh tenaga banyak untuk melihat dan FKUB membuat rekomendasi kalau masjid itu memberikan stempel, sehingga tidak ada pertayaan mengenai legalitas formal dalam pendirian ruma peribadatan.

4. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kebijakan Dibiidang Keagamaan Yang Berkatan Dengan Kerukunan Umat Beragama Dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu bentuk upaya FKUB Kota Bima dalam mengoptimalkan peranan, yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai keberadaan FKUB dan juga sosialisasi perauran perundang-undangan yang berkatan dengan kerukunan umat beragama, dalam al ini PBM No.9 dan No,8 Taun 2006 kepada toko agama dan tokoh masyarakat di Kota Bima yang bertujuan untuk pengembangan kerukunan umat beragama di Kota Bima.

FKUB pada dasarnya didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukanya juga bersentuan dengan kerukunan internal umat beragama .

Misalnya FKUB berusaha untuk mensosialisasikan tentang pentingnya kerukunan kepada anggotanya agar setiap perwakilan anggota kelompok selalu menjaga kerukunan, sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB ke kelompok umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan mensosialisasikan terkait persoalan kerukunan umat beragama tersebut kepada umatnya agar menjaga toleransi baik antar umat beragama maupun internal umat beragama.

Sosialisasi selalu melibatkan tokoh lintas agama, dan juga ormas islam karena memang tokoh ormas islam, tokoh pemuda, dan tokoh wanita di masukan dalam kepengurusan FKUB Kota Bima . Sehingga yang menjadi akar penguatan pada tugas pokok dan fungsinya FKUB Kota Bima menjalankan dan mengoptimalkan perannya melalui kegiatan sosialisasi tersebut dalam rangka upaya pengendalian konflik dan pemeliharaan kerukunan antara umat beragama di Kota Bima, yang nantinya dapat menumbuhkan toleransi yang kuat serta terwujudnya kehidupan yang baik dalam intern dan umat beragama yang ada di Kota Bima. Adapun peranan sosialisai ini sebagai langkah yang dapat di perankan oleh FKUB Kota Bima untuk mencegah dan menanggulangi konflik umat beragama di Kota Bima.

Karena melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus FKUB Kota Bima, maka umat beragama yang ada di Kota Bima dapat memaami dengan betul bahwa dalam kehidupan beragama diperlukan rasa saling menghormati kepercayaan atau agama yang dianut dari setiap orang, agar terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai diantar umat beragama serta

dapat terbina dengan baik. Dan akan melahirkan sebuah kerukunan yang kuat dalam kehidupan beragama di Kota Bima.

5. Memberikan Rekomendasi Tertulis atas Permohonan Pendirian Rumah Ibadah

Sala satu tugas dari FKUB Kota Bima yaitu memberikan rekomendasi tertulis untuk pendirian rumah ibadah, tugas tersebut terus dilakukan oleh FKUB Kota Bima sebagai upaya dalam mengoptimalkan perannya untuk menjaga ketertiban pendirian ruma ibada di Kota Bima, agar tidak terjadi perselisian diantar umat beragama yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Dalam ala ini FKUB Kota Bima sudah mmeberikan rekomendasi tertulis untuk pembanguna ruma ibada, sehingga pendirian rumah ibadat yang ada di Kota Bima pun dapat terkonntrrol dengan baik. Bakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Bima beberapa tahun terakhir ini lebih banyak dengan persoalan rekomendasi untuk pendiriaan ruma ibadah.

Hal ini terlihat dari FKUB Kota Bima yang telah melakukan pendataan rumah ibadah yang belum diberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah baik di muslim maupun non muslim untuk diberikan rekomendasinya. Dalam mengeluarkan rekomendasi tertulis untuk pendirian ruma ibada pun, FKUB Kota Bima selalu memperhatikan berbagai aspek agar surat rekomendasi itu tidak merugikan atau tidak mengecewakan sala satu pihak dari umat beragama.

Sehingga dalam menuliskan rekomendasi tertulisnya pun, FKUB Kota Bima Selalu mengikuti isi dari kebijakan peraturan perundang-undangan umat beragama, dalam hal ini PBM No.9 dan No.8 Taun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daera atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian ruma ibada bab 4 tentang pendirian rma ibadah yaitu pada pasal 13, 14, 15, 16, 17. Untuk itu rekomendasi-rekomendasi tertulis yang dikeluarkan oleh FKUB Kota Bima telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah.